



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



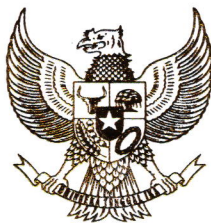
Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim



<https://disbun.kaltimprov.go.id>



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 050/K. 519/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Perubahannya (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sebagaimana berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda;
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
27. Sekretariat Daerah;

28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Kepegawaian Daerah;
33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;
36. Inspektorat;
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dalam pelaksanaan masing-masing Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan wajib melaporkan pengendalian pelaksanaan serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 5 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
PI. KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan wilayah Kalimantan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 5% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA/Perubahan RENSTRA.

Dalam pelaksanaannya pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan serta berbagai persoalan mendasar seperti pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani, terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurangnya koordinasi kerja antar sub sektor yang terkait pembangunan perkebunan.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 pada sub sektor perkebunan adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan 2019 – 2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun secara selaras dengan tema RKPD tahun 2023 yaitu ***“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur Yang Berdaulat”*** dan mengakomodasikan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya seperti Pokok –Pokok Pikiran Rakyat, Aspirasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan renja PD tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2023;
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2023;
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu:

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Pada tahun 2021 Dinas Perkebunan melaksanakan 5 (Lima) program pembangunan dan 1 (Satu) program penunjang dengan total anggaran sebesar Rp. 54.524.471.000 terdiri dari program penunjang sebesar Rp. 26.546.275.000 dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000 dan melalui mekanisme perubahan APBD 2021 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi tambahan menjadi Rp. 54.578.829.592 (bertambah Rp. 54.358.592) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 26.600.933.592 dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000 dengan total realisasi

sebesar Rp. 48.375.766.031 (88,64%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 23.838.334.677 (89,62%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.537.431.354 (87,70%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi.
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat.
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan.
4. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan.
6. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana penjabaran berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 23.838.334.677 dari pagu 26.600.633.592 dengan capaian keuangan 89,62% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 103%. Program ini memiliki output Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan

dengan capaian 89% dari target 86%. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator nilai akuntabilitas kinerja PD dengan capaian 72,63% atau 103,76% dari target 70%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator presentase ASN yang memiliki standar kompetensi dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 23% atau 115% dari target 20%;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 100% atau 500% dari target 20%;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 50% atau 250% dari target 20%;
- dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 20% atau 100% dari target 20%.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 5 unit atau 100% dari target 5 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 8 jenis atau 100% dari target 8 jenis;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 6 jenis atau 100% dari target 6 jenis;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 9 jenis atau 100% dari target 9 jenis; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

7 Kegiatan diatas di dukung dengan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yakni:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan capaian 10 dokumen atau 100% dari target 10 dokumen. Dokumen tersebut antara lain: DPA, RKA, DPPA, RKAP, RKT, Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, Pedoman Umum, Evaluasi Renja.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun dengan capaian 4 laporan atau 100% dari target 4 laporan. Dokumen tersebut antara lain:

LkjIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Laporan Statistik Perkebunan Tahun 2020.

c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan dengan capaian 28 dokumen atau 100% dari target 28 dokumen dan jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan.

d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 49 orang atau 98% dari target 50 orang;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 17 orang atau 94% dari target 18 orang;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 6 orang atau 75% dari target 8 orang; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 14 orang atau 93% dari target 15 orang.

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 114 unit atau 100% dari target 114 unit;

- b. Pada UPTD PBP tercapai 12 unit atau 100% dari target 12 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 75 unit atau 100% dari target 75 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 88 unit atau 100% dari target 88 unit.
- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- h) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- i) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah barang cetakan dan penggandaan dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 47.240 lembar atau 100% dari target 47.240 lembar;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 500 lembar atau 100% dari target 500 lembar;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 13.100 lembar atau 100% dari target 13.100 lembar; dan

d. Pada UPTD PBTP tercapai 2.960 lembar atau 100% dari target 2.960 lembar.

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 1.500 eksemplar atau 100% dari target 1.500 eksemplar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 720 eksemplar atau 100% dari target 720 eksemplar;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 8 eksemplar atau 100% dari target 8 eksemplar; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 12 eksemplar atau 100% dari target 12 eksemplar.

k) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 4 kegiatan atau 100% dari target 4 kegiatan;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 2 kegiatan atau 100% dari target 2 kegiatan;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 2 kegiatan atau 100% dari target 2 kegiatan; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 15 kegiatan atau 100% dari target 15 kegiatan.

l) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 34 unit atau 100% dari target 34 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.

m) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah surat yang diadministrasikan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 750 lembar atau 100% dari target 750 lembar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.

n) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

o) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;

- c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- p) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- q) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit.
- r) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan

- d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- s) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 13 unit atau 100% dari target 13 unit.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.377.021.965 dari pagu Rp. 10.569.000.000 dengan capaian kinerja keuangan 88,72%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 5.190.021.450 dari pagu dana Rp. 6.005.000.000 dengan capaian kinerja keuangan 86,43% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 101,90%. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di dukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan Output Kegiatan Produktivitas komoditas perkebunan strategis dengan target tahun 2021 18,4 Ton/Ha sedangkan realisasi produktivitas 16,11

Ton/Ha atau capaian kinerja 87,55%. Capaian produktivitas tersebut diperoleh dari produksi komoditas unggulan perkebunan yaitu Kakao, Karet, Kelapa dalam, Kelapa Sawit dan Lada dibagi dengan luas tanaman menghasilkan. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun sub kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.1. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	17.136.849,15	17.461.751,15	101,90	Angka sementara Tahun 2021 (Sumber: Dinas Perkebunan)
	• Kelapa Sawit	17.036.402	17.375.224	101,99	
	• Karet	77.763	70.010	90,03	
	• Kakao	3.771	2.180	57,81	
	• Kelapa Dalam	12.479	10.164	81,45	
	• Lada	6.434	4.173	64,86	
	• Pala	0.15	0,15	100	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	18,4	16,11	87,55	
Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida,	1	1	100	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
sarana pendukung pertanian	Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (dokumen)				
	a. Produkti vitas Komodita s Perkebu nan (Kakao) (Ton/Ha)	0,75	0,52	69,33	
	b. Produkti vitas Komodita s Perkebu nan (Karet) (Ton/Ha)	1,4	1,32	94,28	
	c. Produkti vitas Komodita s Perkebu nan (Kelapa) (Ton/Ha)	0,82	0,64	78,04	
	d. Produkti vitas Komodita s Perkebu nan (Kelapa)	20	17,30	86,50	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
	Sawit) (Ton/Ha)				
	e. Produkti vitas Komodita s Perkebu nan (Lada) (Ton/Ha)	1,18	0,72	61,01	

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas komoditi unggulan di atas pada tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peremajaan karet seluas 100 Ha dan Intensifikasi karet seluas 100 Ha

Kegiatan peremajaan karet dilaksanakan di Kabupaten Paser dengan capaian 100 Ha dari target 100 Ha. Sedangkan kegiatan intensifikasi karet tercapai 100 Ha dari target seluas 100 Ha berlokasi di Kabupaten Kutai Timur seluas 20 Ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 80 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel II.2. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Karet Seluas 100 Ha Intensifikasi Karet Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Peremajaan Karet		
	Gapoktan Jaya Abadi	100	Desa Makmur Jaya

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
			Kec. Long Kali Kab. Paser
II	Intensifikasi Karet		
1.	Sidodai II	20	Desa Margomulyo Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim
2.	Suka Tani II	30	Kpg. Ombau Asa Kec. Barong Kab. Kutai Barat
3.	Riuq Mua Jadiq	25	Kpg. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
4.	Tunas Karya	25	Kpg. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
Total Bantuan		200	

2) Intensifikasi Kelapa seluas 20 Ha

Kegiatan intensifikasi seluas 20 Ha. Kegiatan Intensifikasi Kelapa seluas 20 Ha di Kabupaten Penajam Paser Utara Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Seluas 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi Kelapa		
	Bina Bersama	20	Kel. Tanjung Tengah Kec. Penajam Kab. PPU
Total Bantuan		20	

3) Intensifikasi kelapa sawit 100 Ha

Kegiatan Intensifikasi kelapa sawit terealisasi seluas 100 Ha dari 100 Ha yang ditargetkan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha, Kota Samarinda seluas 20 Ha, Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 30 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.4. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi kelapa sawit 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi kelapa sawit		
1	Subur Makmur	50	Desa Tanjung Labu. Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutim
2	Pada Elo	20	Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran Kota Samarinda
3	Kutai Mandiri	20	Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar
4	Lada Sari	10	Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kukar

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
Total Bantuan		100	

- 4) Intensifikasi lada 150 Ha dan rehabilitasi lada seluas 50 Ha
 Kegiatan intensifikasi lada terealisasi seluas 150 Ha dari target 150 Ha sedangkan rehabilitasi lada terealisasi seluas 50 Ha dari target 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi lada 150 Ha, dan rehabilitasi lada seluas 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi lada		
1	Garuda Tani	30	Kampung Biatan Lempake Kec. Biatan Kab. Berau
2	Karya Bersama	25	Kpg. Pesayan Kec. Sambaliung Kab. Berau
3	Embun Pagi	10	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
4	Hijau Daun	20	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
5	KTW. Anisa Sejahtera	5	Desa Batu-batu Kec. Muara Badak
6	Karya Insani	0,75	Kel. Sempaja Utara BerambaiKec. Samarinda Utara
7	Karya Utama	1	Kel. Sempaja Utara BerambaiKec. Samarinda Utara
8	Karya Utama	1,75	Kel. Sempaja Utara

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
9	Karya Abadi	2	BerambaiKec. Samarinda Utara Kel. Sempaja Utara BerambaiKec.
10	Tunas Baru	4,5	Samarinda Utara Kel. Sempaja Utara BerambaiKec.
11	Sejahtera Abadi Jaya	50	Samarinda Utara Kmp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan
II	Rehabilitasi Lada		
1	Sri Rejeki A	5	Argomulyo Kab. PPU
2	Sri Rejeki B	14	Argomulyo Kab. PPU
3	Karya Bangun	10	Argomulyo Kab. PPU
4	Karya Muda	5	Argomulyo Kab. PPU
5	Gunung Makmur II	7	Semai Dua Kab. PPU
6	Tegar	9	Semai Dua Kec. Sepaku PPU
Total Bantuan		200	

5) Peremajaan kakao seluas 50 Ha dan Intensifikasi kakao seluas 150 Ha

Kegiatan Peremajaan kakao terealisasi seluas 50 Ha dan Intensifikasi kakao terealisasi seluas 150 Ha atau terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 120 Ha, Kabupaten Berau seluas 80 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan kakao seluas 50 Ha, dan Intensifikasi kakao seluas 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Peremajaan kakao		
	Ingin Bersama	50	Desa rantau Sentosa Kec. Busang Kab. Kutim
II	Intensifikasi kakao		
1	Sejahtera	20	Desa Kadugan Jaya Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
2	Lesau Ame	25	Desa Rantau Sentosa Kec. Busang Kutai Timur
3	Long Ampung	25	Desa Rantau Sentosa Kec. Busang Kutai Timur
4	Makasang Muara	8	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
5	Misa Kada	20	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
6	Tunas Harapan	7	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
7	Anugrah Jemalay	8	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
8	Berkah Tani Sejahtera	17	Kampung PijanauKec. Gunung Tabur Kab. Berau
9	Gapoktan Mufakat	20	Kpg. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau
Total Bantuan		200	

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di atas antara lain faktor cuaca, adanya perubahan pemilihan komoditi oleh petani (alih komoditi) serta umur tanaman yang relatif telah memasuki usia tua sehingga produksi dan produktifitas tanaman tidak maksimal. Disamping faktor teknis yang menghambat

pelaksanaan kegiatan, pembatalan reconfusing anggaran juga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) terealisasi sebesar Rp. 3.323.835.537 dari pagu sebesar Rp 3.630.000.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,57% dan untuk capaian indikator kinerja 123,09%. Indikator kinerja program ini Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat 75% dengan realisasi 92,32%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung yaitu Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman. Dengan output sub kegiatan yakni jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan sejumlah 55.000 benih dengan realisasi 100% atau 55.000 benih, yang terdiri dari:

- Jumlah benih tanaman semusim dan rempah dengan target 20.000 benih dan realisasi 20.000 benih, terdiri dari benih lada 10.000 benih dan pala 10.000 benih
- Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan target 35.000 benih dan realisasi 35.000 benih, terdiri dari kakao 10.000 benih, kelapa 10.000 benih dan kelapa sawit 15.000 benih

Faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan benih perkebunan yaitu faktor cuaca dan ketersediaan prasarana dan sarana perbenihan yang masih kurang. Untuk itu perlu adanya upaya sebagai langkah antisipasi terhadap kendala yang dihadapi. Untuk itu diperlukan adanya upaya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perbenihan seperti jalan, greenhouse, serta perlunya pengembangan kebun induk lada dan sarana pendukungnya.

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp.

863.164.978 atau 92,42% dari pagu Rp. 934.000.000. Indikator kinerja pada pada program ini adalah jumlah benih yang beredar. Dengan capaian sebanyak 6.121.600 benih atau 102,03% dari target 6.000.000 benih. Berikut rekapitulasi pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Kalimantan Timur tahun 2021:

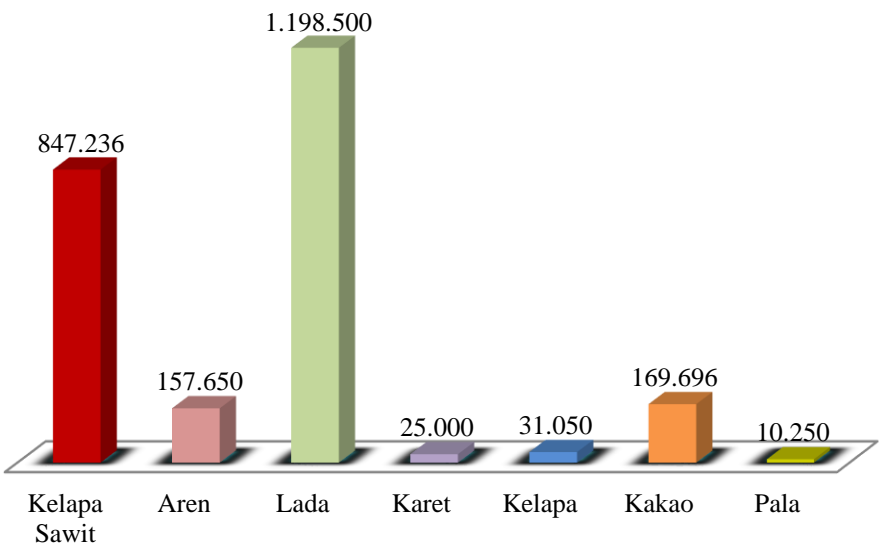
Tabel II.7. Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Bulan	Kelapa Sawit	Lada	Karet	Aren	Kelapa	Kakao	Pala	Serai Wangi	Jumlah	Benih Illegal	Jumlah Total
1.	Januari	11,276	1,075,000	37,000	28,000	3,000	7,500	10,000		1,171,776	32,500	
2.	Pebruari	126,991				18,000	50,000			194,991		
3.	Maret	2,454			150					2,604		
4.	April	136,293	116,500		51,000					303,793		
5.	Mei	21,308	182,700	100,000			45,000		4,000	353,008		
6.	Juni	49,475			6,000					55,475		
7.	Juli	111,179	212,500				157,500			481,179		
8.	Agustus	564,420	83,000		12,000		10,000	10,000		679,420		
9.	September	274,170				10,000				284,170		
10.	Oktober	371,684								371,684		
11.	November	245,000								245,000	20,000	
12.	Desember	1,926,000								1,926,000		
Jumlah		3,840,250	1,669,700	137,000	97,150	31,000	270,000	20,000	4,000	6,069,100	52,500	6,121,600

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi dengan capaian 6.121.600 benih atau 102,03% dari target 6.000.000 benih. Sedangkan sub kegiatan pada kegiatan ini adalah: pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman, dengan indikator:

a. Jumlah benih yang disertifikasi

Capaian indikator ini adalah 2.343.046 benih atau 78,10% dari target 3.000.000 benih, dengan rincian sebagaimana grafik berikut:



Gambar II.1. Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi adalah terbatasnya jumlah Pengawas Benih Tanaman (PBT) yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang meliputi 1 (satu) Pengawas benih Tanaman Ahli dan 3 (tiga) Pengawas Benih Tanaman Terampil membawahi 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 Provinsi Kalimantan Utara sehingga pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan maksimal serta tidak tercapainya jumlah benih yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan oleh pandemi covid 19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kegiatan ini tergantung pada jumlah permohonan masuk.

b. Persentase peredaran benih yang illegitim

Capaian indikator ini adalah 2,51% atau 97,29% dari target 2,58%. Capaian tersebut diperoleh dengan melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran benih di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dibantu oleh tenaga pengawas benih yang ada di Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka penanganan peredaran benih ilegal kelapa sawit. Adapun data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.8. Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Ilegal

No	Asal/Lokasi	Jenis Komoditi	Jumlah Benih	
			Pengawasan	Kasus benih ilegal
1	Desa Girimukti Kab. PPU	Kelapa Sawit	2.500 benih	2.500 benih
2	Desa Putang Kab. Paser	Kelapa Sawit	30.000 batang	30.000 batang
3	Desa Tepian Langsung	Kelapa Sawit	20.000 benih	20.000 benih
4	Kelompok Tani Etam Mandiri Jaya Kec. Muara Jawa	Kelapa Sawit	910 benih	-
5	Kec. Muara Jawa	Kopi	12.000 benih	-
6	Kec. Muara Jawa	Kelapa Dalam	19.325 benih	-
7	CV. Eja Nursery Kab. Kutai Kartanegara	Entres Karet	5.870 pohon	-
8	Kelompok Tani Mega Buana Kab. Kukar	Lada	457.000 stek	-
9	Kelompok Tani Tunas Mekar Kab. Kukar	Lada	65.000 stek	-
10	Kelompok Tani Lada Muda Kab. Kukar	Lada	451.000 stek	-
11	Kab. Bulungan	Lada	221.000 stek	-
12		Kelapa Sawit	25.000 benih	-

No	Asal/Lokasi	Jenis Komoditi	Jumlah Benih	
			Pengawasan	Kasus benih illegal
	UPTD PBTP Disbun Kaltim	Karet	25.000 benih	-
		Aren	10.000 benih	-

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan sertifikasi mutu benih bibit perkebunan pada tahun 2021 ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan pada sumber benih maupun produsen benih tanaman perkebunan.
- Terbatasnya petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang hanya berjumlah sebanyak 4 (empat) orang sedangkan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
- Kurang aktifnya petugas pengawas benih di Kabupaten/Kota dalam mengawasi sumber benih/produsen benih yang ada di wilayahnya sehingga pengawasan peredaran benih di masing-masing Kabupaten/ Kota tidak maksimal dan ketersediaan benih perkebunan tidak dapat dipantau.
- Produsen benih yang telah mempunyai IUPBTP tidak pernah secara rutin melaporkan kegiatan perbenihannya setiap bulan kepada pengawas benih Kabupaten/Kota maupun UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Banyak produsen benih yang tidak menyimpan dokumen penyerta benih dengan baik.
- Produsen benih tidak pernah melaporkan pemasangan label benih (pada saat benih diedarkan) kepada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Tidak ada koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan dari luar wilayah yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur kepada Pengawas Benih Tanaman Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.638.333.304 dari pagu Rp. 10.337.196.000 (83,37%) dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut:

- a. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 6.679.289.750 dari pagu Rp 7.995.000.000 atau 83,54%.

Output program ini adalah:

- a. Luas kebun yang dibangun seluas 1.517.300 Ha dari target 1.425.580 Ha atau 106,43%. Rincian luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel II.9. Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Komoditi	Luas (Ha)
1.	Kelapa Sawit	1.359.016
2.	Karet	118.626
3.	Kakao	7.617
4.	Kelapa Sawit	20.018
5.	Lada	8.128
6.	Komoditi Lain	3.895
Total		1.517.300

*) Angka sementara tahun 2021

- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 34 kelompok tani dari target 30 kelompok atau 113,33%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.10. Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan

No.	Nama Kelompok Tani	Kab/Kota
	Perluasan Kelapa Sawit	
1.	Barokah	PPU
2.	Bukit Babut	PPU
3.	Alas Panyom Bolum	PPU
4.	Maju Makmur	Kukar
5.	Mekar Sari	Kukar
6.	Maju Terus	Kubar
7.	Bina Warga	Kubar
8.	Utok Ipuh	Paser
	Perluasan Kelapa	
9.	Sumber Rejeki	Paser
	Perluasan Lada	
10.	Balu Mulya	Paser
11.	Usaha Baru	Paser
12.	Harapan Sejahtera	Kukar
13.	KTW. Anisa Sejahtera	Kukar
14.	Harapan Utama	PPU
15.	Karya Usaha	PPU
16.	Al-Ikhlas	PPU
17.	Trubus	PPU
18.	Lestari A	PPU
19.	Sinar Mulya	Kutim
20.	Karya Tani	Kukar
	Perluasan Kakao	
21.	Lembah Subur	Berau
22.	Bukit Harapan	Berau
23.	Mantaruning Jaya	Berau
24.	Sukan Lestari	Berau
25.	Apollo	Berau
	Perluasan Karet	
26.	Tujur Betung	Paser
27.	Anugrah	PPU
28.	Guyub Rukun	Kukar
29.	Karya Tani	Kukar
30.	Mekar Baru	Kukar
31.	Mekar Jaya	Kukar

No.	Nama Kelompok Tani	Kab/Kota
32.	Karya Bersama	Kukar
33.	Sambung Jaya Makmur	Kukar
	Perluasan Pala	
34.	Mitra tani	Berau

Program ini di dukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator jumlah luas kebun yang diperluas. Capaian pada indikator ini 670 Ha atau 100% dari target 670 Ha. Sub Kegiatan pada kegiatan ini adalah Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dimana indikatornya yaitu jumlah luas kebun yang diperluas dengan capaian sebagai berikut:

Tabel II.11. Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2021

Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
Jumlah luas kebun yang diperluas (Ha)	670	670	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200	200	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20	20	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200	200	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100	100	100

Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50	50	100

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan perluasan kebun 6 komoditi di atas pada tahun 2021 dengan melaksanakan aktivitas sub kegiatan sebagai berikut:

1) Perluasan areal kakao seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal kakao tercapai 100 Ha dari target 100 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 100 Ha dengan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.12. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
1	Lembah Subur	30	Kamp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan Kab. Berau
2	Bukit Harapan	20	Kamp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan Kab. Berau
3	Mantaruning Jaya	20	Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
4	Sukan Lestari	25	Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau
5	Apollo	5	Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
Total Bantuan		100	

2) Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha

Kegiatan perluasan areal karet tercapai 200 Ha dari target 200 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 45 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 20 Ha, Kabupaten Kutai Kertanegara 135 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel II.13. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
1	Tujur Betung	45	Desa Mungguh Kec. Longkali Kab. Paser
2	Anugrah	20	Kelurahan Gersik Kec. Penajam Kab. PPU
3	Guyub Rukun	25	Desa Perangat Selatan Kab. Kukar
4	Karya Tani	25	Desa Perangat Selatan Kab. Kukar
5	Mekar Baru	20	Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu Kab. Kukar
6	Mekar Jaya	10	Desa Makarti Kec. Marangkayu Kab. Kukar
7	Karya Bersama	15	Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kukar
8	Sambung Jaya Makmur	40	Prangat Baru Kab. Kukar
Total Bantuan		200	

- 3) Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha
- Kegiatan perluasan areal kelapa tercapai 20 Ha dari target 20 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 20 Ha dan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel II.14. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Perluasan Areal Kelapa	20	Desa Laburan Baru Kec. Paser Belengkong Kab. Paser
	Sumber Rejeki		
Total bantuan		20	

4) Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa sawit tercapai 200 Ha dari target 200 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Penanjam Paser Utara seluas 80 Ha, Kabupaten Paser 40 Ha dan Kutai Kertanegara seluas 80 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel II.15. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
	Perluasan kelapa sawit		
1	Barokah	24	Desa Api-api Kec. Waru Kab. PPU
2	Bukit Babut	26	Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU
3	Alas Panyom Bolum	30	Desa Labangka Kab. PPU
4	Maju Makmur	15	Sari Nadi Kota Bangun Kab. Kukar
5	Mekar Sari	10	Teluk Muda Kec. Kenohan Kab. Kukar
6	Maju Terus	30	Desa Penawai Kec. Bongan Kab. Kubar
7	Bina Warga	25	Desa Penawai Kec. Bongan Kab. Kubar
8	Utok Ipuh	40	Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang Kab. Paser
Total Bantuan		200	

5) Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal lada tercapai 100 Ha dari target 100 Ha, Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel II.16. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
1	Balu Mulya	30	Desa BelimbingKec. Long Ikis Kab. Paser
2	Usaha Baru	10	Desa Selerong Kec. Muara Komam Kab. Paser
3	Harapan Sejahtera	10	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
4	KTW. Anisa Sejahtera	5	Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar
5	Harapan Utama	4	Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU
6	Karya Usaha	7	Desa Rintik Kec. Babulu Kab. PPU
7	Al-Ikhlas	6	Desa Bukit Subur Kec. Penajam Kab. PPU
8	Trubus	5	Desa Semoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU
9	Lestari A	6	Desa Semoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU
10	Sinar Mulya	10	Desa Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutim
11	Karya Tani	7	Perangat Selatan Kab. Kukar
Total Bantuan		100	

6) Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha

Kegiatan perluasan areal pala tercapai 50 Ha dari target 50 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 50 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel II.17. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
1	Mitra Tani	50	Desa Teluk Sumbang Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau

Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa faktor penghambat walaupun hal tersebut tidak mempengaruhi capaian target kinerja, namun perlu dilakukan antisipasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan. Faktor penghambat dimaksud antara lain adalah faktor cuaca dan keterlambatan pembukaan lahan oleh kelompok tani dan keterlambatan ketersediaan benih di Kalimantan Timur. Upaya sosialisasi kepada kelompok tani maupun penangkar perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari faktor penghambat tersebut.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 1.959.043.554,- atau 83,64% dari pagu sebesar Rp. 2.342.196.000,. Indikator pada program ini adalah jumlah prasarana kantor yang tersedia dengan target 2 unit dan realisasi sebanyak 2 unit atau 100%. Kegiatan pada program ini adalah penataan prasarana pertanian dengan indikator jumlah prasarana pertanian. Indikator kegiatan ini tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit. Sedangkan sub pada kegiatan ini adalah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya. Indikator pada sub kegiatan ini adalah jumlah bangunan gedung dan laboratorium yang direhab dengan capaian 2 unit atau 100% dari target 2 unit.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.211.933.926 dari pagu Rp. 2.438.000.000 dengan capaian kinerja keuangan 90,72%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 1.132.376.875 atau 92,89% dari pagu dana Rp 1.219.000.000. Output program ini adalah Jumlah penurunan \atau 164,99% dari target 4,079 Juta Ton CO₂eq, Program

ini di dukung oleh Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan output kegiatan:

- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dengan capaian kinerja 100 % atau dengan capaian 128 pelaku usaha dari 128 pelaku usaha yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut Tabel II.18. Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
1.	PT. London Sumatera Plantation	Kutai Barat
2.	PT. Citra Palma Pertiwi	Mahulu
3.	PT. Setia Agro Abadi	Mahulu
4.	PT. Gawi Makmur Kalimantan	PPU
5.	PT. Kebun Mandiri Sejahtera	PPU
6.	PT. Sukses Tani Nusasubur	PPU
7.	PT. Waru Kaltim Plantation	PPU
8.	PT. Langgeng Muara Makmur	Paser
9.	PT. Muaratoyu Subur Lestari	Paser
10.	PT. Multi Jayantara Abadi	Paser
11.	PT. Nusa Lestari	Paser
12.	PT. Pucuk Jaya	Paser
13.	PT. Saraswanti Sawit Makmur	Paser
14.	PT. Aneka Raksa International	Kutai Barat
15.	PT. Borneo Citra Persada Abadi	Kutai Barat
16.	PT. Borneo Citra Persada Jaya	Kutai Barat
17.	PT. Borneo Citra Persada Mandiri	Kutai Barat
18.	PT. Citra Palma Pertiwi	Kutai Barat
19.	PT. Kalimantan Agro Makmur	Kutai Barat
20.	PT. Ketapang Hijau Lestari	Kutai Barat
21.	PT. Marsam Citra Adiperkasa	Kutai Barat
22.	PT. Agroindo Sukses Sejahtera	Berau
23.	PT. Berau Agro Kusuma	Berau
24.	PT. Berau Sawit Sejahtera	Berau
25.	PT. Gunta Samba Jaya	Berau
26.	PT. Hutan Hijau Mas	Berau
27.	PT. Jabontara Eka Karsa	Berau

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
28.	PT. Kukar Commodities Worldwide	Berau
29.	PT. Malindomas Perkebunan	Berau
30.	PT. Mulia Inti Perkasa	Berau
31.	PT. Satu Sembilan Delapan	Berau
32.	PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Berau
33.	PT. General Aura Semari	Berau
34.	PT. Tunas Alam Nusantara	Berau
35.	PT. Yudha Wahana Abadi	Berau
36.	PT. Agri Eastborneo Kencana	Berau
37.	PT. Agro Bumi Kaltim	Berau
38.	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Berau
39.	PT. Alam Jaya Perkasa	Berau
40.	PT. Bahtera Bahagia	Berau
41.	PT. Budiduta Agro Makmur	Berau
42.	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Berau
43.	PT. Enggang Alam Sawita	Berau
44.	PT. Hamparan Sentosa	Berau
45.	PT. Jaya Mandiri Sukses	Berau
46.	PT. Kota Bangun Sawit Sejahtera	Berau
47.	PT. Kutai Agro Jaya	Berau
48.	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Berau
49.	PT. Manunggal Adi Jaya	Berau
50.	PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera	Berau
51.	PT. Niagamas Gemilang	Berau
52.	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	Berau
53.	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Berau
54.	PT. Rea Kaltim Plantations	Berau
55.	PT. Sasana Yudha Bhakti	Berau
56.	PT. Sawit Golden Prima	Berau
57.	PT. Sawit Kaltim Lestari	Berau

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
58.	PT. Sawit Prima Sakti	Berau
59.	PT. Sukses Bina Alam	Berau
60.	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Berau
61.	PT. Teguhjaya Prima Abadi	Berau
62.	PT. Tritunggal Sentra Buana	Berau
63.	PT. Tunas Prima Sejahtera	Berau
64.	PT. Anugerah Alam Persada	Kutai Timur
65.	PT. Anugerah Energitama	Kutai Timur
66.	PT. Agro Inti Mandiri	Kutai Timur
67.	PT. Bima Agri Sawit	Kutai Timur
68.	PT. Bina Palma Nugraha	Kutai Timur
69.	PT. Bumi Mas Agro	Kutai Timur
70.	PT. Cipta Davia Mandiri	Kutai Timur
71.	PT. Cipta Narada Lestari	Kutai Timur
72.	PT. Cipta Prima Selaras	Kutai Timur
73.	PT. Dewata Intisawit Nugraha	Kutai Timur
74.	PT. Dewata Sawit Nugraha	Kutai Timur
75.	PT. Dharma Agrotama Nusantara	Kutai Timur
76.	PT. Dinamika Prima Artha	Kutai Timur
77.	PT. Etam Bersama Lestari	Kutai Timur
78.	PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera	Kutai Timur
79.	PT. Fairco Agro Mandiri	Kutai Timur
80.	PT. Gemilang Sejahtera Abadi	Kutai Timur
81.	PT. Gunta Samba	Kutai Timur
82.	PT. Gunta Samba Jaya	Kutai Timur
83.	PT. Hamparan Perkasa Mandiri	Kutai Timur
84.	PT. Hanusentra Agro Lestari	Kutai Timur
85.	PT. Indonesia Plantation Sinergi	Kutai Timur
86.	PT. Karya Prima Agro Sejahtera	Kutai Timur
87.	PT. Karyanusa Ekadaya	Kutai Timur
89.	PT. Kemilau Indah Nusantara	Kutai Timur
90.	PT. Kutai Balian Nauli	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
91.	PT. Kutai Mitra Sejahtera	Kutai Timur
92.	PT. Long Bagun Prima Sawit	Kutai Timur
93.	PT. Multi Pacific International	Kutai Timur
94.	PT. Nala Palma Cadudasa	Kutai Timur
95.	PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation	Kutai Timur
96.	PT. Perdana Telen Agromas	Kutai Timur
97.	PT. Prima Cipta Selaras	Kutai Timur
98.	PT. Sawit Sukses Sejahtera	Kutai Timur
99.	PT. Setara Kemilau Mas Adicita	Kutai Timur
100.	PT. Sinergi Agro Industri	Kutai Timur
101.	PT. Sumber Bumi Serasi	Kutai Timur
102.	PT. Swakarsa Sinar Sentosa	Kutai Timur
103.	PT. Subur Abadi Plantation	Kutai Timur
104.	PT. Subur Abadi Wana Agung	Kutai Timur
105.	PT. Sumber Alam Selaras	Kutai Timur
106.	PT. Sumber Kharisma Persada	Kutai Timur
107.	PT. Telen	Kutai Timur
108.	PT. Telen Prima Sawit	Kutai Timur
109.	KTPA Desa Salo Palai	Kutai Kartanegara
110.	KTPA Saliki Dock	Kutai Kartanegara
111.	KTPA Saliki Nilam	Kutai Kartanegara
112.	KTPA Genting Tanah	Kutai Kartanegara
113.	KTPA Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
114.	KTPA Muai	Kutai Kartanegara
115.	KTPA Gotong Royong	Kutai Kartanegara
116.	KTP Nyi'an Kasa Pampang	Samarinda
117.	KTPA Waru	PPU

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
118.	KTPA Bangun Mulyo	PPU
119.	KTPA Labangka	PPU
120.	KTPA Labangka Barat	PPU
121.	KTPA Desa Tepian Terap	Kutai Timur
122.	KTPA Desa Pelawan	Kutai Timur
123.	KTPA Desa Sange Batu	Paser
124.	KTPA Desa Perepat	Paser
125.	KTPA Desa Sungai Langir	Paser
126.	KTPA Desa Lori	Paser
127.	KTPA Desa Laburan	Paser
128.	KTPA Tunas Harapan	Balikpapan

- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan dengan realisasi 7 pelaku usaha atau 140% dari 5 pelaku usaha yang menjadi target. Pelaku usaha tersebut antara lain:

1. PT. AE di Kabupaten Kutai Timur;
2. PT. TPS di Kabupaten Kutai Timur;
3. PT. SAWA di Kabupaten Kutai Timur;
4. PT. GSA di Kabupaten Kutai Timur;
5. PT. Jaya Mandiri Sukses di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. PT. Rea Kaltim Plantation di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
7. PT. WKP di Kabupaten Penajam Paser Utara.

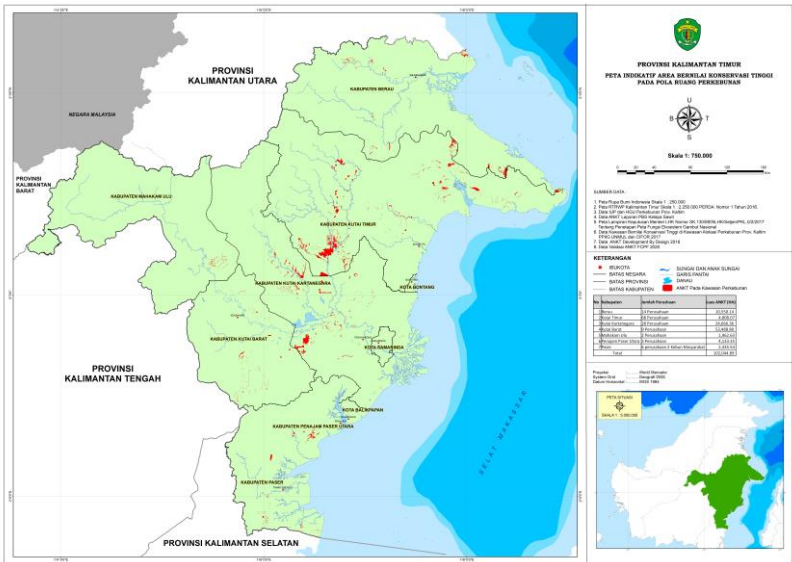
Kegiatan di atas terdiri dari 2 sub kegiatan, yakni:

1. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu Rp 632.000.000 terealisasi sebesar Rp 580.748.200 (91,89%). Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:
 - a) Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergy 1 PMS dengan capaian 1 PMS (100%) yaitu PT. London Sumatera Plantation di Kabupaten Kutai Barat. Dalam mendukung penanganan dampak perubahan iklim Dinas Perkebunan terus berupaya mendorong Perusahaan Besar Swasta untuk membangun perkebunan dengan melakukan penurunan emisi melalui sosialisasi dan koordinasi ke Perusahaan Besar Swasta yang ada.

b) Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi dengan capaian 102.038,85 ha atau 100,04% dari target 102.000 Ha. Data luas NKT di areal perkebunan yang dilindungi sebagai berikut:

Tabel II.19. Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Berau	10.534,39
2.	Kutai Barat	4.805,38
3.	Kutai Kartanegara	24.648,18
4.	Kutai Timur	53.355,71
5.	Mahulu	1.962,28
6.	Paser	4.213,31
7.	PPU	2.519,60
Total		102.038,85



Gambar II.2 Areal dengan Nilai Konservasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

2. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 587.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 551.628.675,- (93,97%). Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:
1. Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina terealisasi sebanyak 20 KTPA atau 133,33% dari target 15 KTPA. Keberhasilan pembentukan Kelompok Tani Peduli API

(KTPA) dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke kabupaten/kota tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM) serta mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan. Namun ke depan masih terdapat tantangan dalam pembinaan KTPA karena masih terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia KTPA yang tersedia. KTPA yang dibentuk dan dibina pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel II.20 KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2021

No.	Nama KTPA	Lokasi		
		Desa/ Kampung/ Kel.	Kecamatan	Kab./Kota
1	KTPA Desa Salo Palai	Desa Salo Palai	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
2	KTPA Saliki Dock	Desa Saliki	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
3	KTPA Saliki Nilam	Desa Saliki	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
4	KTPA Genting Tanah	Desa Genting Tanah	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
5	KTPA Kembang Janggut	Desa Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
6	KTPA Muai	Desa Muai	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
7	KTPA Gotong Royong	Desa Perdana	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
8	KTP Nyi'an Kasa Pampang	Kelurahan Pampang	Kec. Samarinda Utara	Samarinda
9	KTPA Waru	Kel. Waru	Kec. Waru	Penajam Paser Utara

No.	Nama KTPA	Lokasi		
		Desa/ Kampung/ Kel.	Kecamatan	Kab./Kota
10	KTPA Bangun Mulyo	Kel. Bangun Mulyo	Kec. Waru	Penajam Paser Utara
11	KTPA Labangka	Kel. Labangka	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
12	KTPA Labangka Barat	Kel. Labangka Barat	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
13	KTPA Desa Tepian Terap	Desa Tepian Terap	Kec. Sangkuliran g	Kutai Timur
14	KTPA Desa Pelawan	Desa Pelawan	Kec. Sangkuliran g	Kutai Timur
15	KTPA Desa Sange Batu	Desa Sange Batu	Kec.Paser Balengkong	Paser
16	KTPA Desa Perepat	Perepat	Kec. Tanah Grogot	Paser
17	KTPA Desa Sungai Langir	Desa Sungai Langir	Kec. Tanah Grogot	Paser
18	KTPA Desa Lori	Desa Lori	Kec. Tanjung Harapan	Paser
19	KTPA Desa Laburan	Desa Laburan	Kec.Paser Balengkong	Paser
20	KTPA Tunas Harapan	Kelurahan Karang Joang	Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan

2. Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani terealisasi 7 konflik atau 140% dari target 5 konflik. Keberhasilan penanganan konflik dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota dalam memfasilitasi

kegiatan mediasi konflik (honor & fasilitasi pertemuan mediasi). Di samping itu terdapat pula faktor penghambat kegiatan penanganan konflik yaitu jika salah satu pihak tidak ingin dilakukan mediasi sehingga konflik tidak dapat tertangani dengan baik. Pelaksanaan penanganan konflik tahun 2021 sebagai berikut

Tabel II.21. Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Keterangan
1	Kutai Timur	1. PT. AE vs Kelompok Tani Citra Mega Buana dan Kelompok Tani Kudung Permai 2. PT. TPS vs Masyarakat Desa Menamang 3. PT. Subur Abadi Wana Agung, PT. Hamparan	Mediasi tgl. 7 April 2021 di Dinas PPR Kutim 1. Mediasi 1 Juli 2021 di Hotel Grand Fatma TGR (Mediasi I) 2. Mediasi 13 Juli 2021 di Disbun Prov Kaltim dan Zoom 3. Mediasi tgl 12 Oktober 2021 di kantor Disbun Ka. Kukar 4. Mediasi tanggal 17 November 2021 di Hotel Harris Mediasi 5 November 2021 di Kantor

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Keterangan
		Perkasa Mandir vs Masyarakat Adat dayat Desa Long Bentuq 4. PT. Gemilang Sejahtera Abadi vs Masyarakat Desa Tanah Abang	Gubernur Kaltim, Mediasi DPD RI Mediasi 11 November 2021 di Disbun Kutim
2	Kutai Kertanegara	1. PT. Jaya Mandiri Sukses vs PT. Surya Cipta Mahakam 2. PT. Rea Kaltim vs 3 Kecamatan Janggut, Kec. Tabang dan Kec. Kenohan	Mediasi 18 Maret 2021 di Disbun Prov. Kaltim Mediasi 19 Agustus 2021 di Bappeda Kukar
3	Penajam Pasir Utara	PT. Waru Kaltim Plantations vs Koperasi Waru Sawit Nusantara	Mesiasi 17 Maret 2021 di Distan PPU

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 1.079.557.051,- atau 88,56% dari pagu sebesar Rp 1.219.000.000,-. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan capaian Rp. 1.044.792.912,- atau 100,22% dari target Rp. 1.047.138.860,-. Dalam pencapaian program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan indikator luas serangan berat OPT yang dikendalikan, dimana tercapai 220 Ha atau 100% dari tareget 220 Ha. Data luas serangan berat OPT pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel II.22. Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
1	Balikpapan	14 Ha
2	Samarinda	0 Ha
3	Bontang	0 Ha
4	Kutai Kartanegara	0 Ha
5	Kutai Barat	0 Ha
6	Kutai Timur	1 Ha
7	Mahulu	52 Ha
8	Paser	3 Ha
9	Penajam Paser Utara	11 Ha
10	Berau	139 Ha
	Total	220 Ha

Sedangkan sub kegiatan yang mendukung yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator antara lain:

- a) Jenis APH yang dikembangkan dengan target 2 jenis dan realisasi 2 jenis (100%). Jenis APH yang dikembangkan tersebut yaitu Beauveria Bassiana dan Metarhizium anisopliae.
- b) Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter) dengan target 600 liter dan realisasi 600 liter (100%).
- c) Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga) dengan target 2 lembaga dan realiasi 2 lembaga (100%). Lembaga tersebut yaitu Regu Pengendali OPT (RPO) dan Brigade Proteksi Tanaman (BPT).
- d) Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha) dengan target 220 Ha dan realisasi 220 Ha (100%). Pelaksanaan pengendalian serangan OPT pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel II.23. Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
1	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	156.83	135.00
2	Kakao	Penggerek Buah Kakao/PBK (Conopomorpha cramerella)	89.83	52.00
3	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (Ganoderma boninense)	7.30	7.00
4	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	142.50	4.00
5	Kelapa Sawit	Busuk tandan marasmius (Marasmius palmivorus)	0.25	3.00
6	Karet	Gugur Daun Karet (Colletotrichum gloesporioides sp.)	30.50	3.00
7	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	50.00	3.00
8	Karet	Jamur upas (Upasia salmonicolor)	0.50	2.00
9	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	21.90	2.00
10	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (Radopholus similis, Meloidogyne incognita, Fusarium oxyporum, dan Pratylenchus sp.)	1.50	2.00
11	Kelapa Sawit	Apogonia sp.	5.00	1.00
12	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (Ganoderma boninense)	5.00	1.00
13	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	0.63	1.00
14	Lada	Ganggang Pirang	1.00	1.00
15	Kelapa	Kumbang janur (Brontispa sp.)	4.00	1.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
16	Kelapa	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	1.50	1.00
17	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (<i>Radopholus similis</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Fusarium oxyporum</i> , dan <i>Pratylenchus</i> sp.)	1.50	1.00
18	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	1.00	0.00
19	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	2.00	0.00
20	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	5.00	0.00
21	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	2.50	0.00
22	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	8.70	0.00
23	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	5.00	0.00
24	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	5.00	0.00
25	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	7.50	0.00
26	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	15.00	0.00
27	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	5.00	0.00
28	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	5.00	0.00
29	Lada	Jamur upas (<i>Upasia salmonicolor</i>)	0.50	0.00
30	Karet	Jamur upas (<i>Upasia salmonicolor</i>)	3.00	0.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
31	Kelapa Sawit	karat daun	0.25	0.00
32	Kelapa	Kera	5.00	0.00
33	Karet	Kering Alur Sadap	150.00	0.00
34	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	10.00	0.00
35	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	0.40	0.00
36	Kelapa Sawit	Landak (<i>Histrix braciura</i>)	4.00	0.00
37	Lada	Penghisap buah lada (<i>Dasynus piperis</i>)	19.00	0.00
38	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (<i>Radopholus similis</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Fusarium oxyporum</i> , dan <i>Pratylenchus</i> sp.)	2.56	0.00
39	Kelapa Sawit	Tikus (<i>Rattus rattus</i>)	5.00	0.00
40	Kelapa Sawit	Tikus (<i>Rattus rattus</i>)	3.00	0.00
41	Kelapa Sawit	Ulat api (<i>Setora</i> sp./ <i>Parasa</i> sp./ <i>Darna catenatus</i> / <i>Thosea</i> sp./ <i>Hidari irava</i>)	10.00	0.00
42	Kelapa Sawit	Ulat kantong (<i>Mahasena corbetti</i> atau <i>Metisa plana</i>)	70.25	0.00
Total			864.40	220.00

Keberhasilan capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh telah dibentuknya kelembagaan brigade proteksi dan regu pengendali OPT, terkendalnya luas pengendalian OPT, bantuan dari pusat dalam bentuk pestisida nabati 900 liter, serta diselenggarakannya pelatihan pembuatan pestisida nabati dan pelatihan perbanyakan APH.

3. Program Perizinan Usaha Pertanian terealisasi sebesar Rp. 772.764.300 atau 98,57% dari pagu sebesar Rp. 784.000.000. Program ini memiliki

indikator jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 41 perusahaan atau 117,14%. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel II.24. Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Perusahaan
1	Kutai Timur	1. PT. Sinergi Agro Industri 2. PT. Sinergi Agro Industri (mill) 3. PT. Indonesia Plantation Sinergy 4. PT. Bima Palma Nugraha 5. PT. Bina Agri Sawit 6. PT. tapian Nadenggan 7. PT. Kresna Duta Agroindo 8. PT. Kalimantan Agro Nusantara 9. PT. Telen (Bukit Permata/Mill) 10.PT. Telen (Sei Karangan Estate) 11.PT. Telen (Pengadan Estate) 12.PT. Telen Prima Sawit
2	Kutai Kertanegara	1. PT. Sawit Kaltim Lestari 2. PT. Agri East Borneo Kencana 3. PT. Agrojaya Tirta Kencana 4. PT. Maju Kalimantan Hadapan 5. PT. Sawit Prima Sakti 6. PT. Cahaya Anugerah Plantition 7. PT. Prima Mitrajaya mandiri 8. PT. teguh Jayaprima Abadi 9. PT. Jaya Mandiri Sukses 10.PT. Hamparan Sentosa
3	Kutai Barat	1. PT. Kaltim Hijau Makmur 2. PT. Borneo Citra Persada Jaya 3. PT. Bumi Agro Lestari 4. PT. Kruing Lestari Jaya
4	Penajam Paser Utara	1. PT. Sukses Tani Nusasubur 2. PT. Waru Kaltim Plantation 3. PT. Kebun Mandiri Sejahtera 4. PT. Mega Hijau Bersama 5. PT. Alam Permai Makmur Raya

No	Kabupaten	Perusahaan
		6. PT. Agro Indomas 7. PT. Megah Hijau Lestari 8. PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 9. PT. Triteknik Kalimantan Abadi 10. PT. Dwi Mekar Persada 11. PT. Palma Asia Lestari Mandiri 12. PT. Sagita Agro Kencana
5	Berau	1. PT. Global Primatama Mandiri 2. PT. Satu Sembilan Delapan 3. PT. Jabontara Eka Karsa
Total		41 Perusahaan

Program Perizinan Usaha Pertanian didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan. Capaian indikator tersebut yaitu 89 perusahaan atau 102,30% dari target 87 perusahaan, yang terdiri dari 64 pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tahun 2021 dan 25 pelaku usaha yang dimitrakan dari 2019-2020. Pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel II.25 Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2021

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
1.	Kutai Timur	1. PT. KPAS 2. PT. AE 3. Kop. Seleq Sejahtera 4. KLP Tani Citra Mega Buana 5. PT. Hanucipta Pratama Buana 6. PT. Telen Prima sawit 7. PT. SAWA 8. PT. Setara Kilau Mas Adicita 9. PT. PT. KAN 10. PT. KDA 11. PT. Tapian Nadenggan 12. PT. KBSA 13. PT. Sabantara Rawi Sentosa

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		14.PT. KIN 15.PT. IPS 16.PT. Nala Palma Cadudasa 17.PT. SAP 18.PT. KCW 19.PT. TAL 20.PT. Nadila Indoagro Planttaion 21.PT. Alhada Agro Sejahtera 22.PT. Mukti Sejahtera Abadi 23.Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 24.KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT. Dharma Inti Sawit Nugraha 25.Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Swakarsa Sinar Sentosa 26.Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 27.Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT. Nusantara Agro Sentosa 28.Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT. Indonesia Plantation Synergi 29.Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT. Kresna Duta Agroindo 30.KSU Karya Mulia Etam Mitra Usaha PT Telen 31.Koperasi Bumi Baay Persada Mitra Usaha PT Telen 32.KSU Nyawatan Sawit Lestari (Sei Karangan Estate) Mitra Usaha PT Telen 33.Kop Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 34.Koperasi Berkat Telen Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 35.Koperasi Rukmana Sari Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		36.KSU Bina Abadi Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 37.Koperasi Sumber Harum Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 38.KSU Etam Jaya Mandiri I Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 39.Koperasi Titian Bungur Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 40.KSU Rakyat Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 41.KSU Pasir Putih Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 42.KSU Karya Maju Bersama (KMB) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 43.Koperasi Pemuda Sasangka (Fairco II) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 44.Koperasi Lestari Jaya Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 45.Koperasi Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 46.KSU Benua Baru Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit
2.	Kutai Kartanegara	47.PT. Niagamas gemilang 48.PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa 49.PT. Hamparan Sentosa 50.PT. Mitra Bangga Utama 51.KPRI Aroma 52.PT. PMM 53.PT. TJA 54.PT. Rea Kaltim Plantations 55.PT. JMS 56.PT. Enggang Alam Sawita 57.Kop. Menamang Membangun 58.Kop. Mou Sejahtera 59.PT. Sukses Bina Alam
3.	Kutai Barat	60.PT. Rimba Raya Tama 61.PT. Harapan Rimba Raya 62.PT. KAL

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		<p>63.PT. CAK</p> <p>64.PT. Kruing</p> <p>65.PT. Farinda Bersaudara</p> <p>66.PT. BCPM</p> <p>67.PT. BJPJ</p> <p>68.Koperasi Sawit Mahang Permai Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia</p> <p>69.Koperasi Tuah Haji Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia</p> <p>70.Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya Mitra Usaha PT. Farinda Bersaudara</p> <p>71.Koperasi Sempekat Penawang Lendian Sejahtera Mitra Usaha PT Ketapang Agro Lestari</p> <p>72.Koperasi Sawit Karya Bersama Lestari Jaya Mitra Usaha PT Kruing Lestari Jaya</p> <p>73.Koperasi Sawit Sibak Mandiri Mitra Usaha PT Kutai Agro Lestari (CT Agro)</p>
4.	Penajam Paser Utara	<p>74.PT. WKP</p> <p>75.PT. SBSL</p> <p>76.PT. Mega Hijau Bersama</p> <p>77.PT. Mega Hijau Lestari</p> <p>78.Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari</p> <p>79.Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera</p> <p>80.Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations</p>
5.	Berau	<p>81.PT. Cahaya Agro Sejahtera</p> <p>82.PT. Tunas Alam Nusantara</p>
6.	Paser	<p>83.PT. BWS</p> <p>84.PT. GMK</p>

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		85.PT. AAMU 86.PT. M3A 87.PT. BMML 88.Koperasi Lengkuhan Jaya Mitra Usaha PT. Pucuk Jaya 89.Koperasi Marinjan Himba Makmur Bolum Mitra Usaha PT Pucuk Jaya

Sub Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan indikator:

1. Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan dengan target sebanyak 35 lembaga pekebun terealisasi sebanyak 35 lembaga pekebun (100%). Terdapat penambahan 10 lembaga pekebun yang dimitrakan dari tahun 2020. Lembaga pekebun yang dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel II.26. Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2021

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
1.	Kutai Timur	1. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 2. KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT. Dharma Intisawit Nugraha 3. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Swakarsa Sinar Sentosa 4. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 5. Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT. Nusantara Agro Sentosa 6. Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT. Indonesia Plantation Synergi 7. Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT. Kresna Duta Agroindo

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
2.	Penajam Paser Utara	1. Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 2. Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera 3. Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations

2. Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina dengan target 52 perusahaan dan realisasi 54 perusahaan (103,85%). Perusahaan yang dibina tersebut antara lain:

Tabel II.27. Perusahaan yang Dibina Tahun 2021

No.	Kabupaten	Perusahaan
1.	Kutai Timur	1. PT. KPAS 2. PT. AE 3. Kop. Seleq Sejahtera 4. KLP Tani Citra Mega Buana 5. PT. Hanucipta Pratama Buana 6. PT. Telen Prima sawit 7. PT. SAWA 8. PT. Setara Kilau Mas Adicita 9. PT. PT. KAN 10. PT. KDA 11. PT. Tapian Nadenggan 12. PT. KBSA 13. PT. Sabantara Rawi Sentosa 14. PT. KIN 15. PT. IPS 16. PT. Nala Palma Cadudasa 17. PT. SAP 18. PT. KCW 19. PT. TAL 20. PT. Nadila Indoagro Planttaion 21. PT. Alhada Agro Sejahtera

No.	Kabupaten	Perusahaan
		22. PT. Mukti Sejahtera Abadi
2.	Kutai Kartanegara	23. PT. Niagamas gemilang 24. PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa 25. PT. Hamparan Sentosa 26. PT. Mitra Bangga Utama 27. KPRI Aroma 28. PT. PMM 29. PT. TJA 30. PT. Rea Kaltim Plantations 31. PT. JMS 32. PT. Enggang Alam Sawita 33. Kop. Menamang Membangun 34. Kop. Mou Sejahtera 35. PT. Sukses Bina Alam
3.	Kutai Barat	36. PT. Rimba Raya Tama 37. PT. Harapan Rimba Raya 38. PT. KAL 39. PT. CAK 40. PT. Kruing 41. PT. Farinda Bersaudara 42. PT. BCPM 43. PT. BJPJ
4.	Penajam Paser Utara	44. PT. WKP 45. PT. SBSL 46. PT. Mega Hijau Bersama 47. PT. Mega Hijau Lestari
5.	Berau	48. PT. Cahaya Agro Sejahtera 49. PT. Tunas Alam Nusantara
6.	Paser	50. PT. BWS 51. PT. GMK 52. PT. AAMU 53. PT. M3A 54. PT. BMML

Capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan di atas dapat melampaui dari target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Melakukan modifikasi dan inovasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam situasi COVID 19 dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan;
3. Melakukan pertemuan fasilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perkebunan tentang peraturan dan perundang undangan tentang kemitraan dan kewajiban perusahaan perkebunan;
4. Melakukan koordinasi dengan semua pihak baik di Provinsi Kaltim, Kabupaten/Kota se Kaltim dan Mitra Pembangunan Perkebunan dalam percepatan penyelesaian konflik perkebunan melalui mediasi; dan
5. Melakukan koordinasi kepada Mitra Pembangunan Perkebunan (YKAN dan Wisolve) dalam pelaksanaan Pelatihan SIP Kebun Lanjutan.

Meskipun pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas melampaui target namun masih ditemui permasalahan diantaranya:

1. Pada tahun 2021 masih tingginya kasus COVID 19 sehingga semua pelaksanaan kegiatan terhambat;
2. Kurangnya Tenaga Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang bersertifikat;
3. Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Penilai Usaha Perkebunan (PUP) di Kabupaten;
4. Belum pahamnya masyarakat pekebun tentang arti kemitraan;
5. Masih adanya perusahaan perkebunan yang belum menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya;
6. Kurangnya tenaga ahli penilai fisik kebun;
7. Aplikasi SIP Kebun pada Web Site Disbun yang belum siap dan mengalami gangguan dan perbedaan formn isian dengan kabupaten; dan

8. Kurangnya tenaga mediator yang bersertifikat baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten se Kalimantan Timur.

4. Program Penyuluhan Pertanian terealisasi sebesar Rp. 3.537.377.859 atau 91,88% dari pagu sebesar Rp. 3.850.000.000 Target indikator pada program ini yaitu jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebanyak 1 lembaga (100%). Pada program didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- a) Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian
- Kegiatan ini memiliki indikator jumlah SDM petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 25 orang atau 100% dari target 25 orang. Petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya tersebut antara lain:

Tabel II.28. Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	4 Orang
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Orang
3.	Kabupaten Kutai Timur	7 Orang
4.	Kabupaten Kutai Barata	4 Orang
5.	Kabupaten PPU	2 Orang
6.	Kabupaten Paser	2 Orang
7.	Kabupaten Berau	4 Orang
	Total	25 Orang

- b) Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian
- Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:
1. Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 31 kelompok tani atau 100% dari target 31 kelompok tani.

Tabel II.29. Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya
Tahun 2021

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
1.	Lembah Subur	Kakao	Berau
2.	Bukit Harapan	Kakao	Berau
3.	Mantaruning Jaya	Kakao	Berau
4.	Apollo	Kakao	Berau
5.	Sukan Lestari	Kakao	Berau
6.	Guyup Rukun	Karet	Kutai Kartanegara
7.	Mekar Jaya	Karet	Kutai Kartanegara
8.	Karya Jaya	Karet	Kutai Kartanegara
9.	Mekar Baru	Karet	Kutai Kartanegara
10.	Karya Bersama	Karet	Kutai Kartanegara
11.	Sambung Jaya Maju	Karet	Kutai Kartanegara
12.	Maju Makmur	Kelapa Sawit	Kutai Kartanegara
13.	Mekar Sari	Kelapa Sawit	Kutai Kartanegara
14.	KWT Anisa Sejahtera	Lada	Kutai Kartanegara
15.	Harapan Sejahtera	Lada	Kutai Kartanegara
16.	Maju Terus	Kelapa Sawit	Kutai Barat
17.	Bina Marga	Kelapa Sawit	Kutai Barat
18.	Barokah	Kelapa Sawit	Kutai Barat
19.	Alas Panyom Bolum	Kelapa Sawit	Kutai Barat
20.	Bukit Babut	Kelapa Sawit	Kutai Barat
21.	Harapan Utama	Lada	Kutai Barat
22.	Karya Usaha	Lada	Kutai Barat
23.	Al-Ikhlas	Lada	Kutai Barat
24.	Trubus	Lada	Kutai Barat
25.	Lestari A	Lada	Kutai Barat
26.	Sumber Rejeki	Kelapa	Paser
27.	Balu Mulya	Lada	Paser
28.	Usaha Baru	Lada	Paser
29.	Tujur Betung	Karet	Paser

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
30.	Sederhana	Karet	Paser
31.	Mitra Tani	Pala	Berau

2. Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan dengan capaian 1 unit atau 100% dari target 1 unit, yaitu teknologi diversifikasi kelapa.

c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk dengan capaian 20 lembaga atau 100% dari target 20 lembaga. Lembaga ekonomi pekebun tersebut antara lain:

Tabel II.30. Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	1 Lembaga
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Lembaga
3.	Kabupaten Kutai Timur	5 Lembaga
4.	Kabupaten Kutai Barat	4 Lembaga
5.	Kabupaten PPU	2 Lembaga
6.	Kabupaten Paser	2 Lembaga
7.	Kabupaten Berau	4 Lembaga
	Total	20 Lembaga

2. Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI dengan capaian 7 kelompok tani atau 175% dari target 4 kelompok tani. Kelompok tani tersebut antara lain:
- a. Kelompok tani Sido Rukun di Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Kelompok tani Rukun Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Kelompok tani Taka Jaya 2 di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- d. Kelompok tani Harapan Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara;
- e. Kelompok tani Mekar Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara;
- f. Kelompok tani Lalut Isau Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- g. Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Kampung belayan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan kegiatan di atas didukung oleh 7 sub kegiatan yaitu:

- a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dengan target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan dan capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 1 kegiatan (100%), yaitu kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) bagi Petugas Teknis Perkebunan/ Penyuluh Lapangan yang Membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur.
- b) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan target kinerja sebagai berikut:
 - 1. Jumlah jenis olahan hasil perkebunan dengan capaian sebanyak 18 jenis olahan atau 360% dari target sebanyak 5 jenis olahan yaitu:
 - a. Produk Pangan sebanyak 17 jenis olahan terdiri dari: Kecap aren, Permen aren, Cheese cookies gula aren, Selai kolang kaling, Mie sagu, Kue lapis sagu, Kue sagu keju, Nata de coco KW, Kue sagon kelapa, Kembang gula kelapa, Minuman coklat Milk 3 in 1, Coklat conventure milk, Coklat compound, Pengolahan lada hijau, Pengolahan lada putih, Minuman jahe lada, dan Acar lada.
 - b. Produk Non Pangan sebanyak 1 jenis olahan yaitu Pengolahan Bokar
 - 2. Jumlah promosi yang diikuti target 10 event dengan realisasi 15 event atau 150%. Promosi yang diikuti tersebut antara lain:

Tabel II.31. Promosi yang Diikuti Tahun 2021

No.	Event	Waktu Pelaksanaan
1.	Kaltim fair	15-19 Maret 2021
2.	Pembuatan Video Promosi	25 Mei-30 Juni 2021
3.	Bimtek E-Commerce	6-7 Juli 2021
4.	Pengembangan Informasi pasar (Buletin harga Pasar)	Januari-Desember 2021
5.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Planet Swalayan	17 April 2021
6.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Auto Swalayan	15 April 2021
7.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Yugo Market	6 September 2021
8.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Industri Perhotelan	Maret 2021
9.	Kaltim Expo	22-26 September 2021
10.	Workshop Pengolahan dan Pemasaran serta launching Toko Kebun Kaltim	25-27 Oktober 2021
11.	Mou tentang Promosi dan pemasaran Produk Olahan dan Non Olahan Komoditas Perkebunan Kalimantan Timur antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Hotel Four Point By Sheraton Balikpapan	26 Oktober 2021
12.	Espo Kuliner dan Launching Rumah Adat	12-15 November 2021

No.	Event	Waktu Pelaksanaan
	Lamin Anjungan Kaltim di TMII Jakarta	
13.	Sosialisasi dan Bimtek Jaminan Halal	17-18 November 2021
14.	Bazaar dan Wisata Kuliner HUT DWP ke-22	28 November-1 Desember 2021
15.	Forum Investasi Kalimantan Timur	7 Desember 2021

- c) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 20 pertemuan atau 100% dari target 20 pertemuan. Pertemuan tersebut antara lain:

Tabel II.32. Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Pertemuan
2.	Kabupaten Kutai Barat	2 Pertemuan
3.	Kabupaten PPU	3 Pertemuan
4.	Kabupaten Paser	5 Pertemuan
5.	Kabupaten Berau	4 Pertemuan
	Total	20 Pertemuan

- d) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 24 lembaga atau 100% dari target 24 lembaga. Terdapat penambahan 4 lembaga dari tahun 2020 sebanyak 20 lembaga. Penambahan 4 lembaga tersebut yaitu:
- Kelompok Tani Anugerah Jemalay di Kabupaten Berau;
 - Kelompok Tani Sumber Ilahi Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - KUD Rangan di Kabupaten Paser; dan
 - KUD Sumber Rejeki di Kabupaten Paser.

- e) Pendampingan Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 9 unit atau 100% dari target 9 unit. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina antara lain:
- 1 MPIG Kampung Belayan dengan komoditi Gula Aren di Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2 MPIG Lada Malonan dengan komoditi lada di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan dan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3 MPIG Kakao Berau dengan komoditi kakao di Desa Tanjung Redep Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau;
 - 4 UPPB Semoga Jaya dengan komoditi karet di Desa Sukaraja Kec. Sepaku Kabupaten PPU;
 - 5 UPPB Jaya Mandiri dengan komoditi karet di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
 - 6 UPPB Etam Jaya dengan komoditi karet di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
 - 7 UPPB Gresik Bangkit dengan Komoditi karet di Kelurahan Gresik Kecamatan Penajam Kabupaten PPU;
 - 8 UPPB Jaya Barokah dengan komoditi karet di Desa Bentuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda; dan
 - 9 UPPB Pampang Jaya dengan komoditi karet di Desa Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- f) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan untuk SNI. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 8 kali atau 133,33% dari target sebanyak 6 kali dengan realisasi 8 kali atau capaian kinerja 133%. Pengujian sampel produk hasil perkebunan tersebut antara lain:
- a. Pengujian Bokar sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari kelompok tani Sido Rukun di Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, kelompok tani Rukun Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan

- kelompok tani Taka Jaya 2 di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Pengujian mutu biji kakao sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari kelompok tani Harapan Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartanegara, kelompok tani Mekar Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara, kelompok tani Lalut Isau Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartaengara.
- c. Pengujian aren sebanyak 2 kali dimana sampel tersebut berasal dari kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Kampung belayan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara
- g) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dengan target kinerja yaitu jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 1 pertemuan atau 100% dari 1 pertemuan, yaitu pertemuan Pelatihan Sekolah Lapang Hama Terpadu (SL-PHT) komoditi Kakao yang diselenggarakan pada bulan April dan Juli di Kabupaten Berau.

Rata-rata pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada rencana kerja dan selama pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami permasalahan yang signifikan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel II.33. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Indikator KInerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	5,0	5,2	5,3	5,3	4,97*	5,2	5,3	5,3

No	Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terhadap PDRB (%)									
	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)		19.087	20.493	21.997	21.997	16 951,83*	20.493	21.997	21.997
2.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Perusahaan)	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	53	58	63	63	62	58	63	63
3.	NTP pekebun (%)	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	108	110	112	112	151,04	110	112	112

*) Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022

**) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (Desember 2021)

Uraian Pencapaian Kinerja

1. Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tabel II.34 Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2013-2021)

Sektor/Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	2020 *	2021 *
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,65	7,00	7,72	8,22	7,98	7,89	7,95	8,80	8,48
	1 Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	3,36	4,55	5,35	5,35	5,36	5,25	5,31	5,98	5,88
	a Tanaman Pangan	0,22	0,19	0,22	0,20	0,20	0,21	0,21	0,24	0,2
	b Tanaman Hortikultura	0,26	0,33	0,34	0,36	0,33	0,34	0,35	0,39	0,34
	c Tanaman Perkebunan	2,59	4,49	4,33	4,43	4,50	4,34	4,37	4,93	4,97
	d Peternakan	0,25	0,26	0,31	0,32	0,30	0,31	0,33	0,37	0,32
	e Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04

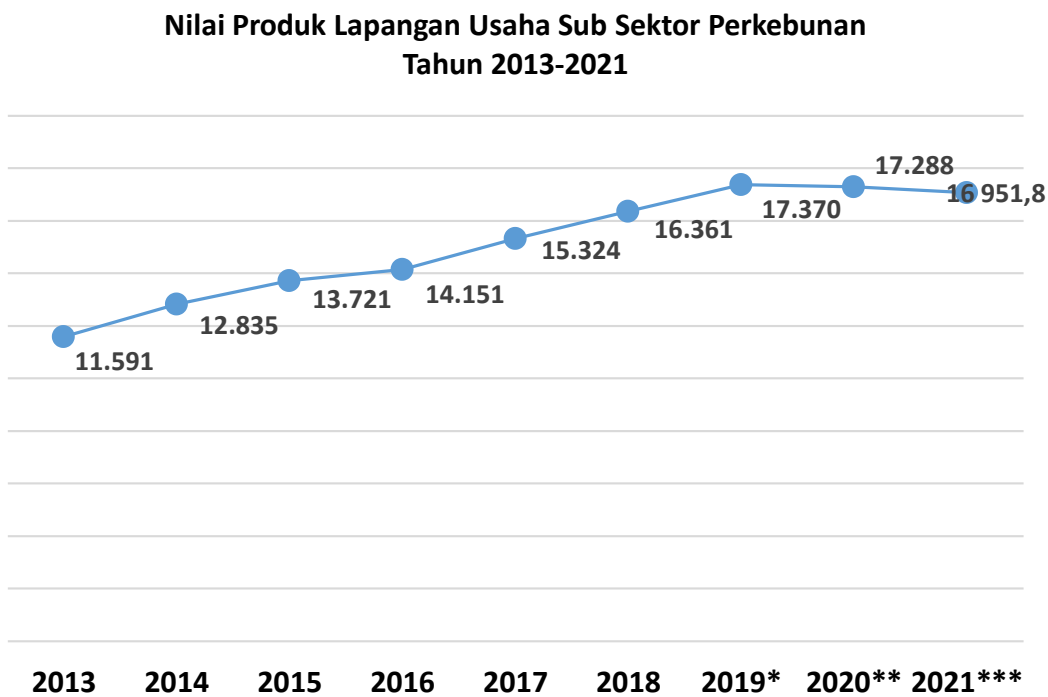
Sektor/Lapangan Usaha			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	2020 *	2021 *
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,11	1,16	1,33	1,34	1,16	1,17	1,12	1,15	1,04
	3	Perikanan	1,18	1,30	1,50	1,54	1,45	1,48	1,53	1,67	1,56

*Data angka Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022

Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh sub sektor perkebunan yang selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Data BPS dalam buku Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,97% atau 5,88% dari PDRB sektor pertanian dalam arti luas.

2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan

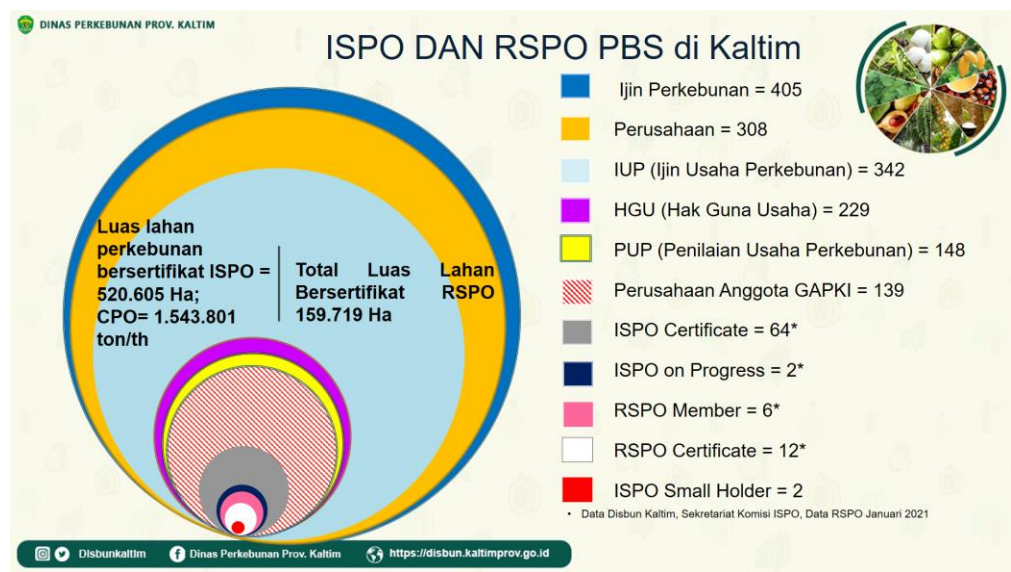
Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,94% yang diakibatkan penurunan produksi di masa pandemi Covid-19. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan pada tahun 2013 sampai dengan 2021:



Gambar II.3

Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2021

3. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan

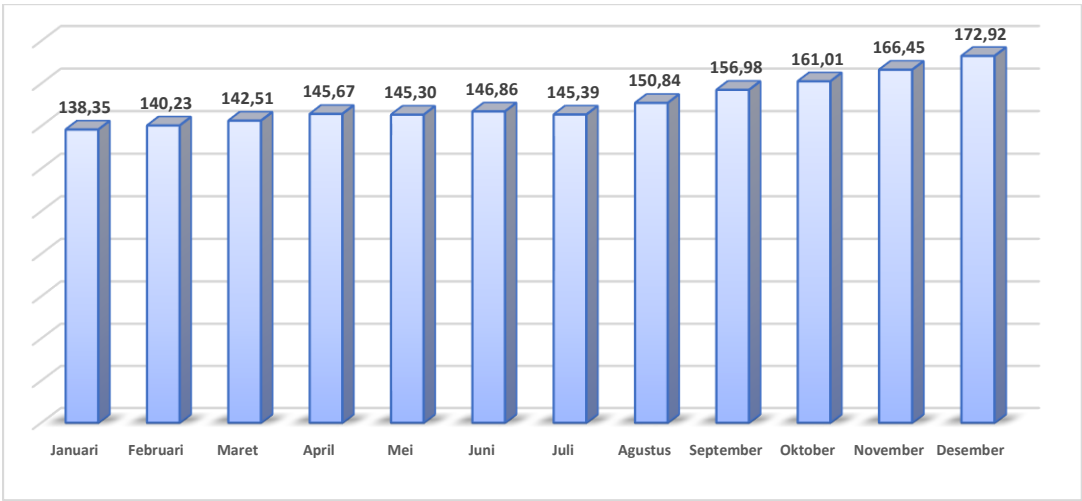


Gambar II.4
ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2021

Berdasarkan gambar II.5, pada tahun 2021 dari 308 Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 62 Perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO dengan luas 523.601,39 Ha atau sekitar 21,94% dari total luas perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

4. NTP Pekebun

Jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama tahun 2021 rata-rata NTP sektor perkebunan dari Januari- Desember sebesar 172,92%. NTP subsektor perkebunan rakyat pada tahun 2021 terlihat cenderung mengalami peningkatan. Berikut perkembangan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2021.



Gambar II.5. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2021

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa peluang dan ancaman juga kekuatan dan kelemahan yang ada terkait dengan dinamika lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai ± 88,47% lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas ± 2,88 Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar ± 1,54 Juta Ha atau 53,47% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada ± 46,53 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2020, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 405 ijin seluas 2.888.609 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 340 IUP dengan luas 2.524.537 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2020 adalah 1.378.136 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukkan bawa terdapat 1,14 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

Tabel II.35 Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2020 Oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			
		Luas yang Telah Dibebani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Berau	281,725	204,725	127,918	100.891
2	Kutai Timur	814,128	745,307	384,100	357,059
3	Kutai Kertanegara	633,647	633,237	262,377	190.324

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			
		Luas yang Telah Dibebani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
1	2	3	4	5	6
4	Kutai Barat	562,355	473,050	257,269	139.888
5	Mahakam Ulu	150,573	138,760	42,667	21.640
6	Penajam Paser Utara	82,552	82,639	29,258	27.992
7	Paser	363,629	246,819	154,214	101.116
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	20
	Jumlah	2,888,609	2,524,537	1,257,804	938.930

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak *clear* dan *clean* nya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek *landbanking* yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan**” oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagian perijinan di sektor perkebunan belum *clear* dan *clean*;
- b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU belum optimal;

- c. Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan;
- d. Pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun masa pembangunan dan operasional belum dilakukan sebagaimana mestinya;
- e. Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan;
- f. Koordinasi penerbitan ijin usaha perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsi belum terlaksana dengan baik;
- g. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi, pengawasan dan pelaporan yang modern berbasis IT dan spasial; dan
- h. Belum dilakukannya pencabutan izin atau pencabutan hak atas tanah pada perusahaan perkebunan yang tidak merealisasikan penanamannya.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Sebagaimana dijelaskan di dalam RPJMD, keterbatasan lapangan usaha masyarakat berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,33% (4,94%) dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2014-2021 pada tabel berikut:

Tabel II. 36 Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2014-2021

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Potensi berdasar- kan PDKP
Kelapa Sawit	14.7 6	17.3 9	14.9 5	16.6 9	16.6 0	20.7 7	17.3 7	16,3 7	20.00
Karet	1.38	1.30	1.30	1.28	1.22	1.08	1.07	1,15	1.67
Kakao	0.71	0.77	0.55	0.50	0.55	0.57	0.61	0,75	1.00
Kelapa Dalam	0.56	0.68	0.63	0.80	0.75	0.67	0.47	0,76	1.50
Lada	1.03	1.06	0.72	0.99	1.05	0.91	0.59	0,99	1.20
Kopi	0.23	0.22	0.24	0.26	0.24	0.21	0.23	0,23	1.30

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabiitasi maupun peremajaan.

Permasalahan “**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan permodalan;
- b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
- c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
- d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS;
- e. Penggunaan benih yang illegitim;
- f. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan
- g. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 162.592 Ha pada tahun 2020. Masih rendahnya pertumbuhan komoditi non sawit disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan “**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Harga komoditas non sawit fluktuatif;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya;
- d. Rantai pemasaran komoditas non sawit belum berpihak kepada petani;
- e. Berkurangnya tenaga kerja pekebun; dan
- f. Terbatasnya lahan karena didominasi oleh perijinan usaha kelapa sawit.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk *crumb rubber*, walaupun untuk *Palm Kernel Oil* (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern berbasis IT;
- b. Tidak kontinyu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan;
- c. Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar;
- d. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana;

- e. Kurangnya sosialisasi dan pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota;
- f. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- g. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang;
- h. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani; dan
- i. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik.

5. Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh perluasan areal perkebunan dianggap salah satu faktor meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menurunnya keanekaragaman hayati (biodiversiti). Namun, informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun.

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu

lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional, nasional dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan **“Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Adanya kampanye negatif terhadap kelapa sawit;
- b. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang diperuntukkan bagi pembangunan perkebunan;
- d. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan;
- e. *Supply Chain* produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Pengawasan dan penerapan Sanksi oleh penerbit izin usaha belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam;
- h. Pemanfaatan limbah cair untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal karena belum didukung oleh kebijakan ketenagalistrikan; dan
- i. Pengelolaan kawasan ANKT di kawasan perkebunan belum optimal.

6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian

pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisikan data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu: Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **“Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah”** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;

- c. Mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan belum didukung oleh deskripsi data yang rinci dan terintegrasi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur dalam pengelolaan data di Kabupaten/ Kota;
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan
- f. Sistem pengelolaan data belum mengarah kepada integrasi pelaksanaan program kegiatan.

7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah (PD) yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;

- c. Mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan perkebunan;
- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan belum optimal;
- f. Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana prasarana;
- g. Belum terbentuknya lembaga korporasi pekebun; dan
- h. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan kelembagaan pekebun.

8. Terdampaknya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19

Pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan masuknya kasus Covid-19 di Indonesia. Penyebaran virus corona atau Covid-19 di dunia, termasuk ke Indonesia berdampak ke sejumlah sektor usaha di Tanah Air. Mulai dari pariwisata hingga perdagangan, termasuk sektor pertanian. Namun demikian sektor perkebunan mampu bertahan dan dapat tumbuh positif serta menjadi penggerak dan pemulih ekonomi di masa Covid-19. Sub sektor perkebunan memiliki nilai ekonomi yang dapat membuat Kalimantan Timur bertahan dari kontraksi ekonomi. Hal tersebut karena sektor perkebunan memproduksi kebutuhan primer yang selalu menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian dampak covid-19 menyebabkan terganggunya usaha perkebunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dari terjadinya perubahan supply dan demand yang mempengaruhi harga komoditas perkebunan ditingkat petani.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Terdampaknya usaha perkebunan akibat Covid-19”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

a. Fluktuasi Harga Pasar

Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk “Jarak Sosial,” mengurangi perjalanan, menghindari keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, konsumen akan membuat pilihan sulit tentang makanan, makan jauh dari rumah, dan tidak normalnya pengeluaran. Tentu situasi ini akan menciptakan pasar dan transaksi tidak normal, sehingga akan mempengaruhi stabilitas

supply dan *demand* barang dan jasa serta harga yang dimungkinkan meningkat.

b. Rantai Pasokan Melambat dan Kekurangan

Karena logistik terganggu dan upaya-upaya memperlambat penyebaran virus, seperti penurunan *supply* dan *demand* CPO yang berakibat pula pada penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan *lockdown*.

c. Kesehatan Petani

Petani adalah populasi yang relatif lebih tua, dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Sensus pada pelaku agri tahun 2017 menunjukkan usia rata-rata operator pertanian hampir 58 tahun usianya, setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari pekerja di sebagian besar sektor lainnya. Tidak seperti pekerja industri lainnya, operator pertanian, 26% berusia 65 tahun ke atas. 11,7% penuh dari operator pertanian utama berusia 75 tahun ke atas. Jika Covid-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani dampaknya dan menimbulkan kepanikan aktivitas akan menambah keterpurukan produksi pangan. Data dari negara lain yang telah melakukan pengujian yang lebih luas menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berusia 60-an dan lebih tua, yang berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk waspada.

d. Meningkatnya PHK dan Pengangguran

Terjadinya penurunan jumlah pekerja di beberapa usaha perkebunan akibat diterapkannya protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

9. Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau untuk IKN

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya juga menyangkut atau bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hal ini merupakan peluang bagi Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan

energi hijau berbasiskan kelapa sawit seperti yang tertuang dalam RPJMN dan RKP tahun 2022.

Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dari produksi CPO kelapa sawit sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,89 juta Ton. Namun demikian masih ditemui kendala dalam hal mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan *green fuel* berbasiskan kelapa sawit. Sementara itu, untuk komoditas lainnya seperti: kakao, aren, lada, dan kelapa dalam dirasa belum mencukupi dalam aspek produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau IKN”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Produksi komoditas non sawit masih belum tercukupi luas dan produktivitasnya;
- b. Minat investasi masih didominasi oleh usaha pembangunan kebun dan sangat sedikit investasi pada industri pengolahan;
- c. Tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh rendahnya fasilitas infrastruktur yang menyebabkan inefisiensi ekonomi yang menghambat minat investor untuk berinvestasi di industri pengolahan subsektor perkebunan; dan
- d. Kebijakan dan regulasi di sektor energi dan listrik menghambat inisiatif perusahaan perkebunan untuk mengembangkan energi berbasis bio massa dan limbah kelapa sawit.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki:
 - Ketersediaan ruang/lahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk pengembangan subsektor perkebunan;
 - Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
 - Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;

- Kualitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
- Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;
- Tersedianya kawasan areal perkebunan yang cukup luas; dan
- Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembangunan daerah cenderung meningkat.

2. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki:

- Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
- Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berdasarkan pengelolaan SDA terbarukan;
- Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
- Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
- Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi;
- Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru; dan
- Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki:

- Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
- Lemahnya penegakan hukum;
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;
- Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat;
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah;
- Lambatnya regenerasi untuk menggantikan pegawai yang memasuki usia

pensiun; dan

- Rendahnya produktivitas kebun dan rendahnya nilai tambah hasil perkebunan.

4. Ancaman (*Threats*) yang dimiliki:

- Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik;
- Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal;
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
- Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
- Isu kehilangan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan;
- Infrastruktur jalan pada areal perkebunan masih terbatas;
- Berkurangnya tenaga kerja subsektor perkebunan;
- Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang tidak dapat dikendalikan;
- Lambatnya hilirisasi untuk menampung dan mengolah produk hasil perkebunan; dan
- Terhambatnya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan;
- b. Pemberdayaan kualitas dan peningkatan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal;
- c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja, baik internal maupun eksternal;
- d. Optimalisasi pemanfaatan pola ruang subsektor perkebunan;
- e. Fokus pada pelaksanaan pembangunan kawasan perkebunan berbasis korporasi yang mengintegrasikan aspek hulu hilir;
- f. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan secara berkelanjutan;

- g. Peningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang yang konkrit, inovatif, partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi hulu hilir berorientasi hasil untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- i. Penguatan kelembagaan yang menangani sub sector perkebunan di Kabupaten/Kota; dan
- j. Tersedia nya anggaran yang memadai untuk pencapaian target indikator Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

II. 5. Review Terhadap Rancangan RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; Program perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD (Tabel TC. 31).

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
4. Program Perizinan Usaha Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian.

Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disinkronkan pada forum perangkat daerah dengan OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 736852 Kode Pos 75124
Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id>, E-mail : disbun_kaltim@yahoo.com.
S A M A R I N D A

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/ 1434 /Sekrt-III/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Puluh Dua telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Penyampaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 oleh Ir. Ujang Rachmad, M.Si Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Pemaparan materi Arah Kebijakan Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dalam RKPDP Provinsi Kalimantan Timur 2023 disampaikan oleh Agustina Rahmawati, S.Pi Kepala Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah Lainnya.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 10 Maret 2022
Jam : 08.30 WITA s/d Selesai
Tempat : Blue Sky Hotel Balikpapan

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 untuk penyusunan rencana kerja (RENJA) Tahun 2023

MENYEPAKATI

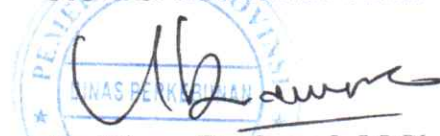
- KESATU : Menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan sub kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

- KEEMPAT : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh Dinas yang menangani Perkebunan Kabupaten/Kota siap melaksanakan kegiatan pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang akan berdampak pada sosial dan ekonomi, penerapan masterplan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani dan manajemen kegiatan dari hulu hingga hilir yang diintegrasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan perkebunan;
- KELIMA : Mengusulkan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengakomodasi penganggaran untuk pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- KEENAM : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita cara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini; dan
- KETUJUH : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 10 Maret 2022

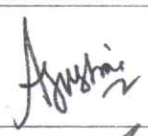
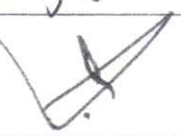
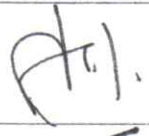
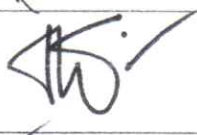

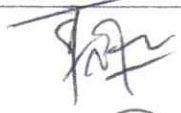

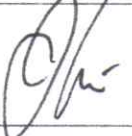
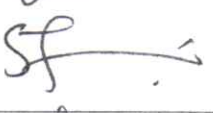
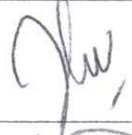
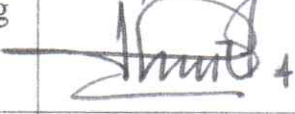
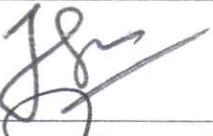
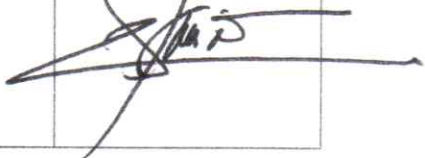
Pimpinan Sidang,
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur

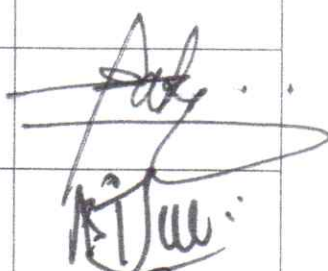
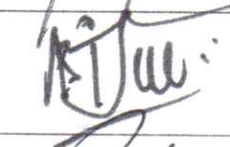
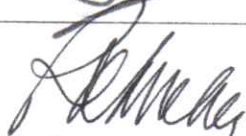


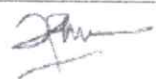



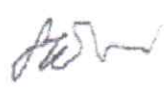



Ir. Ujang Rachmad, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Menyetujui,

Wakil peserta FORUM Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
1.	Agustina Rahmawati, S.Pi	Bappeda Prov.Kaltim	Samarinda	
2.	Ir. Surono, M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
3.	Ir. Hj. Rr. Zuraida H. Hapsari, M.P	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
4.	Ir. Asmirilda, M.P	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
5.	Taufiq Kurrahman, S.Hut, M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
6.	Hj. Siti Juriah, S.P	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
7.	Mahmud Kahfi, S.P., M.P	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
8.	Andi Siddik, S.P., M.Ling	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
9.	Sopian, S.Sos., M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
10.	Ir. H. Heri Suparno, M.Si	Dinas Perkebunan Kab. Berau	Berau	
11.	Hamdani, S.E, M.Si	Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong	
12.	Joko Susanto, S.Hut	Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur	Sangatta	
13.	Markus Darma	Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat	Kubar	

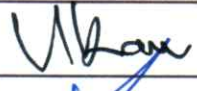

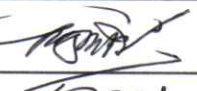
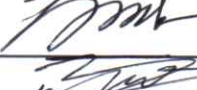
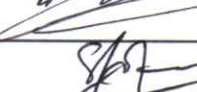


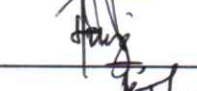



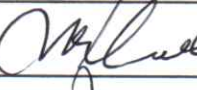
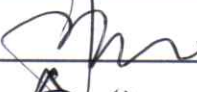




No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
13.	Budi Hariyadi, SP., MP	Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara	PPU	
14.	Djoko Bawono, SP., M.Si	Dinas Perkebunan dan Pternakan Kab. Paser	Paser	
15.	Aji Syarifah Zulaiha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Samarinda	
16.	Ir. H. Yus Alwi Rahman, M.Si	Forum Perkebunan Berkelanjutan	Samarinda	
17.	Tanti Subandiah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim	Samarinda	
18.	Muhammad Abdul Majid	Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim	Samarinda	
19.	Karrak, S.E	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	Balikpapan	
20.	Suprayitno, S.E, M.Si	Biro Perekonomian Setda Prov.Kaltim	Samarinda	
21.	Heliana, S.Sos	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kaltim	Samarinda	
22.	Ir. Martatik, M.Si	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Kaltim	Samarinda	
23.	Sri Wartini, S.E, M.M	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Kaltim	Samarinda	
24.	Nabila Zulfa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Samarinda	

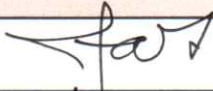
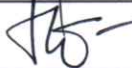
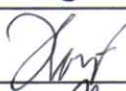

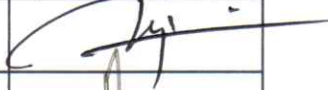

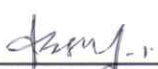


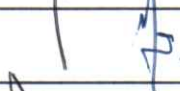












**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERKEBUNAN**













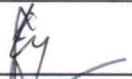

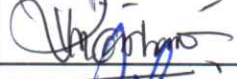
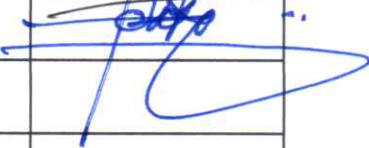
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

TANGGAL : 10 MARET 2022

TEMPAT : BALIKPAPAN

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telpn	Tanda Tangan
1	Ir. Ujang Rachmad, M.Si	Disbun Prov. Kaltim		
2	Ir. Surono, M.Si	Disbun Prov. Kaltim		
3	Muhammadsjah Djafar	GAPKI Kaltim		
4	Taufiq K.	Disbun Kaltim	08 850041388	
5	Laseman	Disbun Kaltim		
6	Ibrahim Hasan	Disbun Kaltim	08532221681	
7	Siti JURIAH	Disbun Kaltim		
8	Hambali.	Disbun Kukar.		
9	Rudiyanto Hamli	Disbun Kukar	08350495291	
10	Larassati Purwandirini	Disbun Kaltim		
11	Ajiygoritoh Zulaiko	Distapangtani And		
12	Johan Susanto	Dinas Perkebun Kaltim	08125979558	
13	SEINARDI	DISTAN. PPU	085349692036	
14	MARCEL DARMA	DISTAN KUKAR		
15	M SYAH PRAPAR	GAPKI Kalti	0811559288	
16	Deny			
17	Arif pwtls	Gapki	08127521451	
18	Muji Dorchman	Disbun Kukar	085248702052	

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telpn	Tanda Tangan
19	FAUZI	Disbum		
20	Asmirul	Disbm		
21	WADUN	Disbm		
22	HERI SUPARNO	Disbm DDM		
23	ARIF. SASTAMIHADZA	Disbm DDM		
24	M. FAHROZI	Disbm Prov. Kaltim		
25	DESSY SUSANTI	Disbm DDM Kaltim		
26	Rr. Zuraids. H. H.	Disbm - Prov Kaltim		
27	Mania Ulf	Disbm Berau -		
28	WAWAN.S	Disbm Prov.		
29	Budi Mahaini	Disbm Prov.		
30	Hermiwaya	Disbm prov		
31	Agustine. R.	Bappeda prov.		
32	Basri Saryati	- - -		
33	Zainul Husein	- - -		
34	Jainal	- - -		
35	Sulh Dewanto	UPTD PBTP DISBUM KALIM		
36	Joharman	UPTD PBTP		
37	MAHMUD KAHFI	UPTD PBTP		
38	MARISA AISYAH	UPTD PBTP		
39	Xus Alun R	Forum QPB		
40	Soplain	UPTD-PBTP		

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telpn	Tanda Tangan
41	TRI SUSLOWATI	UPTD - P2TP		
42	ARIANA	P2TP		
43	Rini Astuti	P2TP		
44	Andi siddik	PBP		
45	Buhairi	UPTD PBP		
46	Hensoo.W	UPTD . PBP		
47	Ade Erza S.	UPTD PBP		
48	Dewi Rahmawati	UPTD PBP		
49	Fateh Mukbarak A.	UPTD PBTB		
50	DAYA,			
51	Hestri Sni. D.	Disbun Prov.		
52	UMAH	PERSOGATARIAN		
53	Markus Darma	DISTAW KUBAR		
54	Eko Y.R	DISTAW KUBAR		
55	M. Bisma Anshory	Disbun Prov.		
56	Budi Goyang A	Bungai		
57	Djoko BAWONZ	Disbunl POK		
58				
59				
60				
61				
62				

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
	DINAS+3 UPTD				52.000.000.000	52.000.000.000
	DINAS PERKEBUNAN				43.904.550.650	43.904.550.650
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92%	92%	23.611.237.650	23.611.237.650
<i>3.27.01.1.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>1.774.925.300</i>	<i>1.774.925.300</i>
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	10 Dokumen	802.771.000	802.771.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	972.154.300	972.154.300
<i>3.27.01.1.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>15.359.114.750</i>	<i>15.359.114.750</i>
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	79 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	14.906.274.750	14.906.274.750

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	452.840.000	452.840.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	20%	936.032.000	936.032.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	1 Paket	352.032.000	352.032.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50 Orang	50 Orang	584.000.000	584.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	5 Unit	5 Unit	1.716.947.254	1.716.947.254
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	35.991.708	35.991.708
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	167.310.000	167.310.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	352.514.181	352.514.181
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	69.731.365	69.731.365

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000	9.600.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.081.800.000	1.081.800.000
3.27.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>	<i>6 Jenis</i>	<i>6 Jenis</i>	<i>227.407.500</i>	<i>227.407.500</i>
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9 Unit	9 Unit	227.407.500	227.407.500
3.27.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	<i>3 Jenis</i>	<i>3 Jenis</i>	<i>2.634.801.146</i>	<i>2.634.801.146</i>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	494.401.410	494.401.410
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	304.192.000	304.192.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.806.207.736	1.806.207.736
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	962.009.700	962.009.700
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18 Unit	18 Unit	400.217.700	400.217.700
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2 Unit	349.932.000	349.932.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	21 Unit	21 Unit	211.860.000	211.860.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	18.313.874,25	6.965.557.600	6.965.557.600
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504	18.197.504		
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000	90.000		
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853	12.853		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000	5.000		
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517	8.517		
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25	0,25		
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha	20,03 Ton/Ha	6.965.557.600	6.965.557.600
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/Ha	22 Ton/Ha	6.965.557.600	6.965.557.600
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,50 Ton/Ha	1,50 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,90 Ton/Ha	0,90 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/Ha	0,85 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,20 Ton/Ha	1,20 Ton/Ha		
		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	30	7.222.948.500	7.222.948.500
		Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674	1.500.674		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	645 Ha	645 Ha	7.222.948.500	7.222.948.500
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	150 Ha	7.222.948.500	7.222.948.500
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	100 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	20 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	100 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	200 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	50 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha	25 Ha		
		Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Ton CO2Eq	4,044 Ton CO2Eq	1.120.000.000	1.120.000.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	137	137	1.120.000.000	1.120.000.000
		a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	132	132		
		b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	5		
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi (PMS)	1 PMS	1 PMS	585.660.000	585.660.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (Ha)	103.000 Ha	103.000 Ha		
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9.317 Ha	9.317 Ha		
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	15 KTPA	15 KTPA	534.340.000	534.340.000
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani (Konflik)	5 Konflik	5 Konflik		
		Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikulturadan Perkebunan (Ha)	150 Ha	150 Ha		
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	35 Perusahaan	750.000.000	750.000.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	107 Perusahaan	107 Perusahaan	750.000.000	750.000.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan (Lembaga Pekebun)	55 Lembaga Pekebun	55 Lembaga Pekebun	750.000.000	750.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina (Perusahaan)	52 Perusahaan	52 Perusahaan		
		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	1 Laporan	1 Laporan		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	1 Lembaga	4.234.806.900	4.234.806.900
<i>3.27.07.1.01</i>	<i>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)</i>	<i>25 Orang</i>	<i>25 Orang</i>	<i>312.046.900</i>	<i>312.046.900</i>
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	312.046.900	312.046.900
		Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang	15 Orang		
<i>3.27.07.1.02</i>	<i>Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian</i>	<i>Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)</i>	<i>31 KT</i>	<i>31 KT</i>	<i>1.877.575.000</i>	<i>1.877.575.000</i>
		<i>Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>		
		<i>Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)</i>	<i>7 Unit</i>	<i>7 Unit</i>		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	5 produk	1.343.750.000	1.343.750.000
		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	11 Produk	11 Produk		
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani (Pertemuan)	20 Pertemuan	20 Pertemuan	533.825.000	533.825.000
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok	10 Kelompok		
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	20 Lembaga	2.045.185.000	2.045.185.000
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	4 KT		
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (lembaga)	32 Lembaga	32 Lembaga	552.475.000	552.475.000
		Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit	1 Unit		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina (unit)	7 Unit	7 Unit	993.750.000	993.750.000
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	7 pelaku usaha	7 pelaku usaha		
		Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan		
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI (Kali)	6 Kali	6 Kali	262.500.000	262.500.000
		Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Unit)	1 Unit	1 Unit		
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani (Pertemuan)	1 Pertemuan	1 Pertemuan	236.460.000	236.460.000
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit	1 Unit		
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.496.308.950	2.496.308.950

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92%	92%	1.460.138.650	1.460.138.650
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	92.520.000	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	92.520.000	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	20%	158.990.000	158.990.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13 Orang	13 Orang	158.990.000	158.990.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	3 Unit	294.022.117	294.022.117
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	4.500.000	4.500.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	24.980.000	24.980.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	61.701.617	61.701.617

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	7.000.500	7.000.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	3.840.000	3.840.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	192.000.000	192.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6 Jenis	6 Jenis	334.506.200	334.506.200
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15 Unit	15 Unit	334.506.200	334.506.200
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	435.339.733	435.339.733
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	2.400.000	2.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	86.977.605	86.977.605

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	188.750.000	188.750.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	157.212.128	157.212.128
3.27.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)</i>	3 Jenis	3 Jenis	144.760.600	144.760.600
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	2 Unit	35.910.600	35.910.600
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	4 Unit	90.000.000	90.000.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	13 Unit	13 Unit	18.850.000	18.850.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000 Benih	6.000.000 Benih	1.036.170.300	1.036.170.300
3.27.02.1.02	<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)</i>	6.000.000 Benih	6.000.000 Benih	1.036.170.300	1.036.170.300

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi (Benih)	3.000.000 Benih	3.000.000 Benih	461.297.250	461.297.250
		Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150 Sertifikat	150 Sertifikat		
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi (Benih)	47.000 benih	47.000 benih	574.873.050	574.873.050
		Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan		
3.27.03	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Kantor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	-	-
<i>3.27.03.1.01</i>	<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah prasarana pertanian</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	-	-
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					3.197.333.000	3.197.333.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92%	92%	1.944.904.600	1.944.904.600
<i>3.27.01.1.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>92.520.000</i>	<i>92.520.000</i>
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	92.520.000	92.520.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	20%	95.200.000	95.200.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 Orang	6 Orang	95.200.000	95.200.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	3 Unit	309.980.917	309.980.917
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	10.699.946	10.699.946
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	17.600.000	17.600.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	77.777.300	77.777.300
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	24.783.671	24.783.671
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	5.120.000	5.120.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	174.000.000	174.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis	367.934.800	367.934.800
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17 Unit	17 Unit	367.934.800	367.934.800
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	495.410.883	495.410.883
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	3.950.000	3.950.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	185.782.355	185.782.355
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	148.466.400	148.466.400
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	157.212.128	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	583.858.000	583.858.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1 Unit	1 Unit	35.510.000	35.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	509.328.000	509.328.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10 Unit	10 Unit	39.020.000	39.020.000
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000	774.940.000	1.252.428.400	1.252.428.400
<i>3.27.05.1.01</i>	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)</i>	<i>156 Ha</i>	<i>156 Ha</i>	<i>1.252.428.400</i>	<i>1.252.428.400</i>
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	2 Lembaga	1.252.428.400	1.252.428.400
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	1.000 KG		
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	600 Liter		
		Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	156 Ha	156 Ha		
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					2.401.807.400	2.401.807.400
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92%	92%	983.464.992	983.464.992
<i>3.27.01.1.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>92.520.000</i>	<i>92.520.000</i>
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	92.520.000	92.520.000
<i>3.27.01.1.05</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>	<i>95.360.000</i>	<i>95.360.000</i>
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7 Orang	7 Orang	95.360.000	95.360.000
<i>3.27.01.1.06</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3 Unit</i>	<i>268.815.973</i>	<i>268.815.973</i>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	2.703.273	2.703.273

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket	2.475.000	2.475.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4 Paket	61.165.200	61.165.200
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket	5.552.500	5.552.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000	1.920.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	195.000.000	195.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	0 Jenis	0 Jenis	-	-
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4 Unit	4 Unit	-	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	407.984.019	407.984.019
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	92.987.659	92.987.659
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	129.231.200	129.231.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	182.765.160	182.765.160
3.27.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)</i>	3 Jenis	3 Jenis	118.785.000	118.785.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	2 Unit	36.510.000	36.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	44.000.000	44.000.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	13 Unit	13 Unit	38.275.000	38.275.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85%	85%	1.418.342.408	1.418.342.408
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)	50.000 Benih	50.000 Benih	1.418.342.408	1.418.342.408
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar (Benih)	30.000 Benih	30.000 Benih	1.418.342.408	1.418.342.408
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	15.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih	0 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	10.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih	5.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	0 Benih	0 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	20.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	10.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	10.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih	0 Benih		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
		Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (laporan)	1 Laporan	1 Laporan		

**DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH
 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN 2023**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
DINAS PERKEBUNAN									
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	Kalimantan Timur	18.313.874,25				
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504	Kalimantan Timur	18.197.504				
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000	Kalimantan Timur	90.000				
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853	Kalimantan Timur	12.853				
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000	Kalimantan Timur	5.000				
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517	Kalimantan Timur	8.517				
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25	Kalimantan Timur	0,25				
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis(Ton/Ha)	20,03 Ton/Ha	Kalimantan Timur	20,30				
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/Ha	Kalimantan Timur	22				
	- Intensifikasi Tanaman Kelapa Sawit		200 Ha		154				
				Kab. Kutai Kartanegara	129	APBD II rencana pengadaan pupuk untuk 100 Ha			
				Kab. Penajam Paser Utara	25				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,50 Ton/Ha	Kalimantan Timur	1,5				
	- Intensifikasi Tanaman Karet		200 Ha		221				
				Kab. Kutai Kartanegara	146	APBD II rencana pengadaan pupuk untuk 90 Ha			
				Kab. Paser	75				
				Kab. Kutai Barat	-	300 Ha			APBN
	- Peremajaan Tanaman Karet		50 Ha		136				
				Kab. Paser	71				
				Kota Samarinda	65				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,90 Ton/Ha	Kalimantan Timur	0,90				
	- Intensifikasi Tanaman Kelapa		20 Ha		72				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
				Kab Kutai Kartanegara	72				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/Ha	Kalimantan Timur	0,85				
	- Intensifikasi Tanaman Kakao		180 Ha		100				
				Kab Kutai Kartanegara	20	APBD II rencana pengadaan pupuk untuk 20 Ha			
				Kab. Berau	80				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,20 Ton/Ha	Kalimantan Timur	1,20				
	- Intensifikasi Tanaman Lada		200 Ha		161				
				Kab. Kutai Kartanegara	38	APBD II rencana pengadaan pupuk untuk 10 Ha			
				Kab. Berau	70				
				Kota Samarinda	10				
				Kab. Penajam Paser Utara	43				
	- Rehabilitasi Lada		50 Ha	Kalimantan Timur					
		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	Kalimantan Timur	1				
		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida. Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1 Laporan	Kalimantan Timur	1				
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	Kalimantan Timur	30				
		Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674	Kalimantan Timur	1.500.674				
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	645 Ha	Kalimantan Timur			1. Dinas Kehutanan Provinsi melaksanakan kegiatan perhutananan sosial dengan melaksanakan budidaya tanaman salah satunya komoditi perkebunan di wilayah kehutanan di 10 Kab./Kota 2. Kolaborasi yang diharapkan terkait pelatihan tentang budidaya tanaman perkebunan		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha		265		1. DPKH Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan integrasi sapi sawit 2. Limbah sawit untuk pakan ternak 3. Sudah dilakukan di PPU di 5 Desa Kec. Babulu		Pola pengembangan sesuai Permentan Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong
				Kab. Kutai Kartanegara	50				
				Kab. Paser	76	APBD II Perluasan Sawit 100 Ha			
				Kab. Penajam Paser Utara	45				
				Kab. Kutai Barat	26				
				Kota Samarinda	68				
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha		25				
				Kab. Kutai Kartanegara	25	APBD II rencana perluasan 10 Ha			
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	Kalimantan Timur	-				
					-				
	- Perluasan Kelapa			Kab. Berau		50 Ha			APBN
	- Perluasan Kelapa Genjah			Kab. Penajam Paser Utara		50 Ha			APBN
				Kab. Paser		APBD II rencana perluasan kelapa genjah 25 Ha			
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha		146				
				Kab. Berau	70				
				Kab. Kutai Kartanegara	20	APBD II rencana perluasan kakao 5 Ha			
				Kab. Kutai Timur	56	100 Ha			APBN
				Kab. Kutai Barat		100 Ha			APBN
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha		70				
				Kab. Kutai Kartanegara	50	APBD II rencana perluasan karet 10 Ha			
				Kab. Paser	20				
				Kota Samarinda		APBD II rencana perluasan karet 10 Ha			
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	Kalimantan Timur	-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
					-				
				Kab. Berau		100 Ha			APBN
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha	Kalimantan Timur	-				
				Kab. Kutai Kartanegara	-	APBD II rencana perluasan aren 5 Ha			
	- Perluasan Tanaman Kopi Robusta			Kab. Kutai Kartanegara		40 Ha			APBN
	- Perluasan Tanaman Kopi Liberika			Kab. Kutai Kartanegara		60 Ha			APBN
	- Perluasan Kopi			Kab. Kutai Kartanegara		APBD II rencana perluasan kopi 25 Ha			
				Kab. Paser		APBD II rencana perluasan Aren 10 Ha			
		Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	Kalimantan Timur	1				
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Ton CO2Eq	Kalimantan Timur	4,044				
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	137	Kalimantan Timur	137				
		a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	132	Kalimantan Timur	132				
		b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	Kalimantan Timur	5				
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi (PMS)	1 PMS						
				Kab. Kutai Timur	1				PT. DSN
				Kab. Kutai Kartanegara	1				PT. Rea Kaltim
				Kab. Kutai Barat	1				PT. Lonsum
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (Ha)	103.000 Ha		103.000				
				Kab. Berau		Telah diterbitkan SK Bupati tentang ANKT			
				Kab Kutai Kartanegara		Telah diterbitkan SK Bupati tentang ANKT			
				Kab. Kutai Timur		Dalam Proses penerbitan SK Bupati tentang ANKT			
				Kab. Kutai Barat		Dalam Proses penerbitan SK Bupati tentang ANKT			

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
				Kab. Penajam Paser Utara		Dalam Proses penerbitan SK Bupati tentang ANKT			
				Kab. Mahulu		Dalam Proses penerbitan SK Bupati tentang ANKT			
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9.317 Ha	Kalimantan Timur	9.317				
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	15 KTPA		16				
				Kab. Berau	2				
				Kab. Kutai Kartanegara	3				
				Kab. Kutai Timur	3				
				Kab. Kutai Barat	2				
				Kab. Penajam Paser Utara	2				
				Kab. Paser	2				
				Kab. Mahulu	2				
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani (Konflik)	5 Konflik		5	1. Koordinasi dengan para pihak yang berkonflik terkait kesiapan pelaksanaan mediasi 2. Bersama-sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi pertemuan mediasi (waktu dan tempat) 3. Melaporkan jumlah kasus konflik perkebunan dan penanganannya			
				Kab. Kutai Timur	2	APBD II rencana akan melaksanakan mediasi akibat konflik pada 8 kelompok tani			1. PT Cipta Davia Mandiri dengan Saudara Sahmin (Klaim Lahan) 2. KSU Rapak jaya dengan PT Gunta Samba (Klaim Lahan).
				Kab. Paser	1				1. PT Pradiksi Gunatama dengan Masyarakat Desa Langgai dan Desa Baay Jaya.
				Kab. Kutai Kartanegara	2				1. PT Perkebunan Tenera Muara Wis, PT Prima Mitrajaya Mandiri, PT Surya Bumi Tunggal Perkasa dengan pemilik lahan / kelompok tani 2. PT Mitra Bangsa Utama dengan perusahaan pertambangan PT Alfara Desa Persada.
		Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan. dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	150 Ha	Kalimantan Timur	150				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	Kalimantan Timur	35	APBD II 1. Kab Kutar 12 Surat (PUP) 2. Kab. Kutim melaksanakan PUP ke 10 Perusahaan			
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	107 Perusahaan	Kalimantan Timur	107				
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan (Lembaga Pekebun)	55 Lembaga Pekebun						
				Kab. Kutai Kartanegara	4				
				Kab. Kutai Barat	6				
	- Fasilitas Penetapan Harga Pembelian TBS			Kalimantan Timur		1 Kegiatan			APBN
	- Rintisan Penerbitan STDB			Kab. Paser		1.000 STDB			APBN
				Kab. Kutai Timur		APBD II rencana melaksanakan penerbitan STDB 250 pekebun			
				Kab. Kutai Kartanegara		APBD II rencana melaksanakan penerbitan STDB 200 pekebun			
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina (Perusahaan)	52 Perusahaan		52				
				Kab. Kutai Timur	16	APBD II rencana melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk 10 PBS			
				Kab. Kutai Kartanegara	5				
				Kab. Berau	5				
				Kab. Paser	10				
				Kab. Penajam Paser Utara	5				
				Kab. Kutai Barat	5				
				Kab. Mahulu	6				
		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	1 Laporan	Kalimantan Timur	1				
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	Kalimantan Timur	1				
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	Kalimantan Timur	25				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	Kalimantan Timur	1				
		Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang	Kalimantan Timur	15				
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	Kalimantan Timur	31				
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	Kalimantan Timur	1				
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	7 Unit	Kalimantan Timur	7				
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk		6				
				Kab. Kutai Barat	3				
				Kab. Paser	3				
		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	11 Produk		11				
				Kab. Kutai Kartanegara	1				
				Kab. Penajam Paser Utara	3				
				Kab. Kutai Timur	2				
				Kab. Paser	1				
				Kota Samarinda	3				
				Kota Balikpapan	1				
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	Kalimantan Timur	1				
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani (Pertemuan)	20 Pertemuan	Kalimantan Timur	20				
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok	Kalimantan Timur	10	1. APBD II Kab. Kutim rencana melaksanakan pembinaan teknis budidaya komoditi perkebunan untuk 2 KT (50 Orang)			

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	Kalimantan Timur	20				
		Jumlah kelompok tani yang produhnya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	Kalimantan Timur	4				
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (lembaga)	32 Lembaga	Kalimantan Timur	32				
		Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit	Kalimantan Timur	1				
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina (unit)	7 Unit		7				
				Kab. Berau	2				
				Kab. Kutai Kartanegara	2			APBD II membentuk 1 KTPA	
				Kab. Kutai Timur	2				
				Kab. Paser	1				
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	7 pelaku usaha		9				
				Kab. Kutai Kartanegara	2				Komoditi Aren dan Kopi
				Kab. Penajam Paser Utara	2				Komoditi Lada dan Kelapa
				Kota Samarinda	4				Komoditi Aren, Kopyor, Lada, Aren, Kelapa
				Kab. Kutai Timur	1				Komoditi Kakao
		Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)	1 Laporan	Kalimantan Timur	1				
	- Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Produk Perkebunan			Kalimantan Timur		1 Kegiatan			APBN
	- Registrasi UPPB			Kalimantan Timur		5 Surat			APBN
	- Peningkatan Capacity Building UPH			Kalimantan Timur		3 Kegiatan			APBN
	- Sarana Pengolahan Tanaman Aren			Kutai Kartanegara		2 Unit			APBN
	- Prasarana Pengolahan Tanaman Aren			PPU		1 Unit			APBN
	- Prasarana Pascapanen Tanaman Kakao			Kutai Timur		2 Unit			APBN
	- Sarana Pascapanen Tanaman Kakao			Kutai Timur		5 Unit			APBN
	- Sarana Pengolahan Tanaman Karet			Kutai Kartanegara		2 Unit			APBN
				Kutai Timur		2 Unit			APBN
	- Prasarana Fasilitas Pengolahan Karet			Kutai Kartanegara		2 Unit			APBN
				Kutai Timur		2 Unit			APBN
	- Prasarana Fasilitas Pengolahan Lada			Kutai Kartanegara		1 Unit			APBN
				PPU		1 Unit			APBN

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI (Kali)	6 Kali		6				
				Kab. Kutai Timur	3				1. Pengujian Biji kakao di Karangas 2. Pengujian gula semut di teluk Pandan 3. Pengujian bokar di Kec. Long Mesangat
				Kota Samarinda	1				Pengujian Bokar di UPPB Jaya barokah
				Kab. Penajam Paser Utara	1				Pengujian lada Bubuk di sepaku
				Kota Balikpapan	1				Pengujian Mutu bokar di Lamaru Kec. Balikpapan Timur
		Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Unit)	1 Unit	Kab. Berau	1				MPIG Kakao Berau Kabupaten Berau
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani (Pertemuan)	1 Pertemuan	Kab. Kutai Kartanegara	1				
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	1				
				Kab. Kutai Timur		APBD II rencana melaksanakan 4 pertemuan (100 orang/4 KT)			
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000 Benih	Kalimantan Timur	6.000.000				
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)	6.000.000 Benih	Kalimantan Timur	6.000.000				
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi (Benih)	3.000.000 Benih	Kalimantan Timur	3.000.000				
		Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150 Sertifikat	Kalimantan Timur	150				
	- Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan (BPT, PIT, Kebun Entres)			Kalimantan Timur		1 Rekom			APBN
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi (Benih)	47.000 benih	Kalimantan Timur	47.000				Perlu dukungan kepada Petugas kabupaten kota terkait peredaran benih ilegal melalui petugas Kab/Kota
		Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan	Kalimantan Timur	1				
	- Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan			Kalimantan Timur		1 Rekom			APBN
	- Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan			Kalimantan Timur		1 Kegiatan			APBN

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
	- Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan			Kalimantan Timur		3 Rekom			APBN
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000	Kalimantan Timur	774.940.000				
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	Kalimantan Timur	156				
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	Kab. Kutai Kartanegara	2				
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	Kota Samarinda	1.000				
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	Kota Samarinda	600				
		Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	Kota Samarinda	2				
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	156 Ha		156				
				Kab. Berau	95				
				Kab. Mahulu	61				
				Kab. Kutai Timur		APBD II luas serangan yang dikendalikan 100 Ha			
	- Operasional Laboratorium Lapangan (LL)			Kalimantan Timur		1 Unit			APBN
	- Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT			Kalimantan Timur		21 Orang			APBN
	- Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan			Kalimantan Timur		1 Unit			APBN
	- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada			Berau		100 Ha			APBN
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85%	Kalimantan Timur	85				Perlu dukungan data peredaran benih dan perencanaan ke depan terkait perbenihan di Kabupaten/Kota
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)	50.000 Benih	Kalimantan Timur	50.000				
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar (Benih)	30.000 Benih	Kalimantan Timur	30.000				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	Kalimantan Timur	15.000				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih		-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Volume	Dukungan PD Terkait		Alasan	Keterangan
						Kab/Kota dan APBN	Provinsi		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	Kalimantan Timur	10.000				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih	Kalimantan Timur	5.000				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	0 Benih		-				
	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Aren			Kab. Kutai Timur		50 Ha			APBN
	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Aren Tahun 8			Kab. Kutai Timur		Berdasarkan hasil Rakortek Kementan pemeliharaan kebun induk aren seluas 5 Ha dan APBD II juga rencana mengalokasikan pemeliharaan kebun induk aren seluas 5 Ha			APBN
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (Benih)	20.000 Benih	Kalimantan Timur	20.000				
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	Kalimantan Timur	10.000	1. Rencana Kukar mengalokasikan pemeliharaan sumber benih Malonan di Loajanan (Salah satunya di kelompok tani pak Basri) 2. Rencana akan ada pengembangan kebun induk lada di Desa Bukit Biru			1. UPTD PBTP memerlukan dukungan dari Disbun Kukar untuk perbanyakan varietas lada Malonan di Kab. Kukar 2. Lada malonan di kukar eksisting 300 pohon 3. Kukar memerlukan dukungan provinsi untuk mempertahankan varietas Malonan di Kukar 4. Akan dilakukan pertemuan antara Provinsi dan Kabupaten Kukar untuk membahas strategi bersama untuk mempertahankan varietas lada Malonan
	- Pemeliharaan BPT dan PIT Lada yang telah ditetapkan			Kab. Kutai Kartanegara		1 Ha			APBN
	- Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lada			Kab. Kutai Kartanegara		4 Ha			APBN
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	Kalimantan Timur	10.000				
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih		-				
		Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (laporan)	1 Laporan	Kalimantan Timur	1				

TABEL T-C29
REKAPTULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERKEBUNAN									
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	89 %	83	86 %	89 %	117	89 %	261	293
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72		70	72,63	104	72	145	201
3.27.001.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	10	10	Dokumen	100	10 Dokumen	30	300
3.27.001.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	4	4	Laporan	100	4 Laporan	12	300
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	28	28	Dokumen	100	28 Dokumen	84	300
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	12	12	Laporan	100	12 Laporan	36	300
3.27.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20	20 %	23 %	115	20 %	63	315
3.27.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	50	50	Orang	98	50 Orang	149	298
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	5	5	Unit	100	5 Unit	15	300

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	114 Unit	114 Unit	100	-	126	1.050
3.27.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4 Unit	4 Unit	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	-	24	200
		Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	47.240	47.240 Lembar	47.240 Lembar	100	12 Bulan	94.492	200
3.27.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	12	1.500 Eksemplar	1.500 Eksemplar	100	47.240 Lembar	48.752	406.267
3.27.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6	8 Jenis	8 Jenis	100	8 Jenis	22	367
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	10	34 Unit	34 Unit	100	15 Unit	59	656
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	500	750 Lembar	750 Lembar	100	3.000 Lembar	4.250	142
3.27.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1 Unit	1 Unit	100	-	13	108
3.27.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	-	21 Unit	21 Unit	100	18 Unit	39	217
3.27.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	4	200
3.27.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	-	9 Unit	9 Unit	100	21 Unit	30	143
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	##### Ton	16.800.471	17.136.849 Ton	17.461.751 Ton	102	18.126.490 Ton	52.388.712	286
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504 Ton	16.717.254	17.036.402 Ton	17.375.224 Ton	102	18.020.894 Ton	52.113.372	286
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000 Ton	74.060	77.763 Ton	70.010 Ton	90	81.651 Ton	225.721	251
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853 Ton	0,8	12.479 Ton	10.164 Ton	81	12.500 Ton	22.665	176
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000 Ton	3.307	3.771 Ton	2.180 Ton	58	4.368 Ton	9.855	197
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517 Ton	5.849	6.434 Ton	4.173 Ton	65	7.077 Ton	17.099	201
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25 Ton	-	0,15 Ton	0,15 Ton	100	0,20 Ton	0	140
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha		18 Ton/Ha	15,23 Ton/Ha	83	19 Ton/Ha	-	172

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.002.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	300
		Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/ha	19,50	1 Ton /Ha	17,3 Ton /Ha	2.307	21 Ton/Ha	58	263
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.5 Ton/ha	1,35	1 Ton/Ha	1,32 Ton/Ha	94	1 Ton/Ha	4	275
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.9 Ton/ha	0,80	1 Ton/Ha	0,64 Ton/Ha	78	1 Ton/Ha	2	254
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/ha	0,70	20 Ton/Ha	0,52 Ton/Ha	3	1 Ton/Ha	2	238
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,2 Ton/ha	1,15	1 Ton/Ha	0,72 Ton/Ha	61	1 Ton/Ha	3	255
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	1.500.674 Ha		1.425.580 Ha	1.517.300 Ha	106	1.462.645 Ha	2.979.945	199
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	30 Kelompok Tani		30 Kelompok Tani	34 Kelompok Tani	113	30 Kelompok Tani	64	213
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	645 Ha		670 Ha	670 Ha	100	595 Ha	1.265	196
3.27.003.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	150	200 Ha	200 Ha	100	150 Ha	500	333
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	100 Ha	200	100 Ha	100 Ha	100			
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	200 Ha	200	200 Ha	200 Ha	100	150 Ha	550	275
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	-	50 Ha	50 Ha	100	50 Ha	100	200

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton Co2eq	4,08	4 Ton CO2eq	6,73 Juta Ton CO2eq	165	4,067 Juta Ton CO2eq	15	368
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	132 Pelaku Usaha	-	128 Pelaku Usaha	128 Pelaku Usaha	100	130 Pelaku Usaha	258	195
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	5 Pelaku Usaha	5	5 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	140	5 Pelaku Usaha	17	340
3.27.005.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	1	1 PMS	1 PMS	100	1 PMS	3	300
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	103.000 Ha	101.500	102.000 Ha	102.039 Ha	100	102.500 Ha	306.039	297
3.27.005.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	5	5 Konflik	7 Konflik	140	5 Konflik	17	340
		Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	15	15 KTPA	20 KTPA	133	15 KTPA	50	333
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	10	35	41 Perusahaan	117	35 Perusahaan	86	246
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	-	87 Perusahaan	89 Perusahaan	102	97 Perusahaan	186	174
	Kabupaten/Kota									
3.27.006.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	55 Lembaga Pekebun	30	35 Lembaga Pekebun	35 Lembaga Pekebun	100	45 Lembaga Pekebun	110	200

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	52	52 Perusahaan	54 Perusahaan	104	52 Perusahaan	158	304
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	1	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	3	300
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	25	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	75	300
3.27.007.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3	300
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 Kelompok Tani		31 Kelompok Tani	31 Kelompok Tani	100	31 Kelompok Tani	62	200
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2	200
3.27.007.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	7 Jenis	2	5 Jenis	18 Jenis	360	7 Jenis	27	386
3.27.007.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah promosi yang diikuti	10 Event	10	10 Event	15 Event	150	10 Event	35	350
		Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	20	20 Pertemuan	20 Pertemuan	100	20 Pertemuan	60	300
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	20	20 Lembaga	20 Lembaga	100	20 Lembaga	60	300
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 Kelompok Tani	2	4 Kelompok Tani	7 Kelompok Tani	175	4 Kelompok Tani	13	325
3.27.007.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	32 Lembaga	-	24 Lembaga	24 Lembaga	100	28 Lembaga	52	163
3.27.007.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	7 Unit	-	9 Unit	9 Unit	100	5 Unit	14	200

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	6 Kali	2	6 Kali	8 Kali	133	6 Kali	16	267
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	1	1 Pertemuan	1 Pertemuan	100	1 Pertemuan	3	300
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan (PBP)									
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86 %	82,39 %	96	89 %	254	286
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20	20 %	100 %	500	20 %	140	700
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bertasarkkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	-	18 Orang	17 Orang	94	13 Orang	30	231
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	6	200
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	-	24	200
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4 Unit	4 Unit	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	500	500 Lembar	500 Lembar	100	500 Lembar	1.500	300
3.27.001.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	12	720 Eksemplar	720 Eksemplar	100	12 Bulan	744	6.200
3.27.001.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	500 Lembar	514	4.283
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	18	300
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	15	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	45	300
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	240	240 Lembar	240 Lembar	100	240 Lembar	720	300
3.27.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4 Unit	4 Unit	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	100	12 Bulan	18	600
3.27.001.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	6	300
3.27.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	4	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	12	300

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	4	4 Unit	4 Unit	100	13 Unit	21	162
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	2.905.176	6.000.000 Benih	6.121.600 Benih	102	6.000.000 Benih	15.026.776	250
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	2.905.176	6.000.000 Benih	6.121.600 Benih	102	6.000.000 Benih	15.026.776	250
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	20.000.000	3.000.000 Benih	2.343.046 Benih	78	3.000.000 Benih	25.343.046	845
		Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	1,58 %	3,08	2,58 %	2,51 %	97	1,58 %	7	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah prasarana kantor yang tersedia	1 Unit		2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	4	400
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian	1 Unit		2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	4	400
3.27.003.1.01.010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah bangunan gedung dan Laboratorium yang direhab yang	1 Unit		2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	4	400
3.27.0.00.0.00.01.000x	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)								-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86 %	84 %	98	89 %	256	288
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %		20 %	50 %	250	20 %	70	350
3.27.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	-	8 Orang	6 Orang	75	8 Orang	14	175
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	9	300
3.27.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	75	75 Unit	75 Unit	100	75 Unit	225	300
3.27.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	13.100	13.100 Lembar	13.100 Lembar	100	13.100 Lembar	39.300	300
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	5	9 Jenis	9 Jenis	100	5 Jenis	19	380
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit		21 Unit	21 Unit	100	17 Unit	38	224
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	3	3 enis	198 enis	6.600	3 enis	204	6.800
3.27.001.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	395	395 Lembar	Lembar	-	395 Lembar	790	200
3.27.001.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1 Unit	198 Unit	19.800	-	210	1.750
3.27.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit		4 Unit	4 Unit	100	10 Unit	14	140
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Rupiah	1.087.534.440	1.047.138.860 Rupiah	1.044.792.912 Rupiah	100	916.648.000 Rupiah	#####	393
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	229	220 Ha	220 Ha	100	195 ha	644	413
3.27.005.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	2	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	6	300
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 Kg	5.000	1.000 Kg	0 Kg	-	1.000 Kg	6.000	600
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	500	600 Liter	600 Liter	100	600 Liter	1.700	283

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	2	2	2 Lembaga	100	2 Lembaga	6	300
		Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	229	220	220 Ha	100	195 Ha	644	413
3.27.0.00.0.00.01.000x	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)								-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86 %	87,13 %	101	89 %	259	291
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %		20 %	20 %	100	20 %	40	200
3.27.001.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang		15	14 Orang	93	10 Orang	24	240
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3	3	3 Unit	100	3 Unit	9	300
3.27.001.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	88	88 Buah	100	12 Bulan	112	933
3.27.001.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1	1 Unit	100	12 Bulan	25	208
3.27.001.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar		2.960	2.960 Lembar	100	3.000 Lembar	5.960	199

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	12	12 Eksemplar	12 Eksemplar	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	12 Bulan	39	325
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 Unit	5	9 Unit	9 Unit	100	5 Unit	19	380
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12	3 Jenis	3 Jenis	100	12 Bulan	27	225
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	12 Bulan	12	210 Lembar	210 Lembar	100		222	1.850
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	9	300

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.001.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	6	300	
3.27.001.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	300	
3.27.001.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	13	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	39	300	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80 %	85	75 %	92,32 %	123	80 %	257	322	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	177.000	55.000 Benih	55.000 Benih	100	50.000 Benih	282.000	564	
3.27.002.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	30.000 Benih	45.000	20.000 Benih	20.000 Benih	100	30.000 Benih	95.000	317	
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	25.000	10.000 Benih	10.000 Benih	100	10.000 Benih	45.000	450	
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	10.000	10.000 Benih	10.000 Benih	100	10.000 Benih	30.000	300	
		Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	132.000	35.000 Benih	35.000 Benih	100	10.000 Benih	177.000	590	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih	20.000	10.000 Benih	10.000 Benih	100	20.000 Benih	50.000	1.000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	2.000	10.000 Benih	10.000 Benih	100	10.000 Benih	22.000	220	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	50.000	15.000 Benih	15.000 Benih	100	10.000 Benih	75.000	500	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

Samarinda, 6 Juli 2022
KEPALA,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi;
2. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
3. Status dan luas kepemilikan lahan;
4. Pendidikan dan usia petani;
5. Kemiskinan pedesaan;
6. Dampak disrupsi revolusi industri 4.0;
7. Dampak perubahan iklim (DPI); dan
8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani.

Sedangkan dalam pembangunan perkebunan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas);
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT);
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku); dan

7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar).

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2020-2024, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **"Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia"**.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta

3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan 7 misi pembangunan nasional di antaranya adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

a) Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis;
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
4. Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan;
5. Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI;
6. Memperpendek rantai pasok;
7. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
8. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian; dan
9. Inovasi pertanian bioindustry.

b) Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia. Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi:

1. Peningkatan pemasaran dan investasi;
2. Penerapan standarisasi dan mutu hasil;
3. Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan;
4. Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian;
5. Penguatan sistem perkarantina;
6. Digitalisasi dan percepatan pertanian; dan
7. Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan.

c) Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastruktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
2. Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan;
3. Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
4. Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian;
5. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan
6. Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.

d) Arah kebijakan 4: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian
Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi:

1. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian;
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional;
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan
6. Penguatan kelembagaan petani.

e) Arah kebijakan 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Kerangka Strategi Pembangunan Perkebunan Nasional



Berdasarkan arahan strategis Direktorat Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:

- a) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
- b) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- c) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- d) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
- e) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; dan
- f) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

III.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra dan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 adalah meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan.

III.2.2.Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Starategi (Renstra) dan Perubahan Renstra 2019-2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama adalah meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan
 - Peningkatan produksi komoditi perkebunan

- b. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
- Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
 - Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan
 - Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor
 - Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan Perkebunan
2. Misi Kedua adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut:
- a. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)
- Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
- b. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah
- Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
- c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
- Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
- d. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid
- Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan
- e. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan
- Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan
 - Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan
- f. Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan
- Penanganan hama dan penyakit
 - Efektivitas Mitigasi Emisi GRK
 - Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran
- g. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan

- Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
- Penanganan konflik perkebunan
- h. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Memperpendek mata rantai pemasaran produk pekebunan rakyat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2019-2023 sebagai berikut:

a. Meningkatkan nilai produk sub sektor perkebunan, dengan indikator :

- Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)

b. Meningkatkan usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, dengan indikator :

- Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)

c. Meningkatkan kesejahteraan pekebun, dengan indikator :

- NTP Perkebunan Rakyat (%)

III.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

A. Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- d. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 serta mengacu pada RKPD 2022, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Rugas dan Fungsi.
- 4) Administasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
dan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
dan
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan
 - b) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:

- a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN.
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani;
 - b) Pendampingan Manajemen Koorporasi petani;
 - c) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani; dan
 - d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Tahun 2023 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah sebesar **Rp. 53.197.790.000,-** (*Lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Total anggaran dinas sebesar Rp.

43.618.793.138,- UPTD PBP sebesar Rp. 2,779,000,968,- UPTD P2TP sebesar Rp. 2,799,999,446 dan UPTD PBTP sebesar Rp. 3,999,996,448,- (Tabel TC. 33)

Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dinas Perkebunan				43.618.793.138			44.522.290.650
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan		92%	24.072.561.738	APBD	92%	24.596.457.650
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		74	1.275.323.500		74	1.774.925.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	10 Dokumen	648.757.500		10 Dokumen	802.771.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	4 Laporan	626.566.000		4 Laporan	972.154.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)		12 Bulan	15.280.723.258		12 Bulan	15.359.114.750
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Samarinda	79 Orang/ Bulan	14.906.203.258		79 Orang/ Bulan	14.906.274.750
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1 Dokumen	374.520.000		1 Dokumen	452.840.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20%	392.570.000		20%	936.032.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Samarinda	1 Paket	282.500.000		1 Paket	352.032.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Samarinda	50 Orang	110.070.000		50 Orang	584.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)		5 Unit	1.738.342.000		5 Unit	1.716.947.254
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	35.902.000		4 Paket	35.991.708
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah pkaet peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	117.262.000		4 Paket	167.310.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4 Paket	439.938.000		4 Paket	352.514.181
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	52.640.000		4 Paket	69.731.365
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Samarinda	12 Dokumen	9.600.000		12 Dokumen	9.600.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	1 Laporan	1.083.000.000		1 Laporan	1.081.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		13 Jenis	1.388.704.000		13 Jenis	1.212.627.500
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Samarinda	2 Unit	985.220.000		2 Unit	985.220.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Samarinda	25 Unit	403.484.000		25 Unit	227.407.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)		3 Jenis	2.926.567.488		3 Jenis	2.634.801.146
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	31.210.000		1 Laporan	30.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	479.967.400		1 Laporan	494.401.410
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Samarinda	1 Laporan	336.242.400		1 Laporan	304.192.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	2.079.147.688		1 Laporan	1.806.207.736

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)		3 Jenis	1.070.331.492		3 Jenis	962.009.700
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	18 Unit	271.654.400		18 Unit	400.217.700
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	2 Unit	396.708.000		2 Unit	349.932.000
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlahsarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	21 Unit	401.969.092		21 Unit	211.860.000
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)		18.313.874,25	6.766.710.000	APBD	18.313.874,25	6.965.557.600
	Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)		18.197.504			18.197.504	
	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)		90.000			90.000	
	Produksi Komoditi Perkebunan		12.853			12.853	
	Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)		5.000			5.000	
	Produksi Komoditi Perkebunan (lada)		8.517			8.517	
	Produksi Komoditi Perkebunan (pala)		0,25			0,25	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)		20,03 Ton/Ha	6.766.710.000		20,03 Ton/Ha	6.965.557.600
Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1 Laporan	6.766.710.000		1 Laporan	6.965.557.600
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)		30 KT	7.428.634.000	APBD	30 KT	7.222.948.500
	Luas kebun yang dibangun (Ha)		1.500.674			1.500.674	
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)		545 Ha	7.428.634.000		545 Ha	7.222.948.500

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	7.428.634.000		1 Dokumen	7.222.948.500
Program Pengendalian dan penganggulan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)		4,044 Juta Ton CO2eq	1.827.790.000	APBD	4,044 Juta Ton CO2eq	1.120.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:		137	1.827.790.000		137	1.120.000.000
	a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)		132			132	
	b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)		5			5	
Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Batikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	9317 Ha	1.027.790.000		9317 Ha	585.660.000
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	Batikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	150 Ha	800.000.000		150 Ha	534.340.000
Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)		35 Perusahaan	1.050.000.000	APBD	35 Perusahaan	1.200.000.000
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	Batikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	107 Perusahaan	1.050.000.000		107 Perusahaan	1.200.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	Batikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Laporan	1.050.000.000		1 Laporan	1.200.000.000
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)		1 Lembaga	2.473.097.400	APBD	1 Lembaga	3.417.326.900
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)		25 Orang	187.295.700		25 Orang	312.046.900

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (Orang)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	15 Orang	187.295.700		15 Orang	312.046.900
Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)		31 KT	1.057.437.900		31 KT	1.440.624.000
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)		1 Unit			1 Unit	
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)		7 Unit			7 Unit	
Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1 Dokumen	656.480.000		1 Dokumen	906.799.000
Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	10 Kelompok	400.957.900		10 Kelompok	533.825.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)		20 Lembaga	1.228.363.800		20 Lembaga	1.664.656.000
	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)		4 KT			4 KT	
Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1 Unit	210.455.900		1 Unit	552.475.000
Pendampingan manajemen koorporasi petani	Jumlah pendampingan manajemen koorporasi petani (Laporan)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1 Laporan	693.228.000		1 Laporan	718.428.000
Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Jumlah koorporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya (Unit)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1 Unit	157.293.000		1 Unit	157.293.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Unit	167.386.900		1 Unit	236.460.000
UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				2.779.000.968			2.484.331.345
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bidang Perkebunan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan		92%	1.773.599.068	APBD & DAK	92%	1.448.161.045
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)		12 Bulan	93.120.000		12 Bulan	92.520.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1 Dokumen	93.120.000		1 Dokumen	92.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20%	158.990.000		20%	158.990.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	13 Orang	158.990.000		13 Orang	158.990.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)		3 Unit	586.467.800		3 Unit	294.022.117
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	14.792.800		4 Paket	4.500.000
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	48.431.000		4 Paket	24.980.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	58.574.000		4 Paket	61.701.617
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	5.430.000		4 Paket	7.000.500
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	Samarinda	12 Dokumen	3.840.000		12 Dokumen	3.840.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Laporan	455.400.000		1 Laporan	192.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		6 Jenis	170.752.500		6 Jenis	334.506.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Samarinda	15 Unit	170.752.500		15 Unit	334.506.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)		3 Jenis	533.642.768		3 Jenis	423.362.128
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	5.500.000		1 Laporan	2.400.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	122.738.000		1 Laporan	75.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	239.943.360		1 Laporan	188.750.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	165.461.408		1 Laporan	157.212.128
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (Jenis)		3 Jenis	230.626.000		3 Jenis	144.760.600
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	Samarinda	2 Unit	22.406.000		2 Unit	35.910.600
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Samarinda	4 Unit	180.000.000		4 Unit	90.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Samarinda	13 Unit	28.220.000		13 Unit	18.850.000
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar (Benih)		6.000.000 Benih	1.005.401.900	APBD	6.000.000 Benih	1.036.170.300

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)		6.000.000 Benih	1.005.401.900		6.000.000 Benih	1.036.170.300
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Benih)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	150 Sertifikat	508.790.900		150 Sertifikat	461.297.250
Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Laporan	496.611.000		1 Laporan	574.873.050
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				2.799.999.446			3.197.333.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan		92%	1.767.778.446	APBD	92%	1.944.904.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)		12 Bulan	93.120.000		12 Bulan	92.520.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1 Dokumen	93.120.000		1 Dokumen	92.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20%	90.000.000		20%	95.200.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	6 Orang	90.000.000		6 Orang	95.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)		3 Unit	358.353.200		3 Unit	309.980.917
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	9.139.000		4 Paket	10.699.946
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	3.420.000		4 Paket	17.600.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	69.604.000		4 Paket	77.777.300

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	20.230.200		4 Paket	24.783.671
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Samarinda	12 Dokumen	5.760.000		12 Dokumen	5.120.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Laporan	250.200.000		1 Laporan	174.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		5 Jenis	186.971.000		5 Jenis	367.934.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Samarinda	17 Unit	186.971.000		17 Unit	367.934.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/ pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)		3 Jenis	507.555.848		3 Jenis	495.410.883
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	5.200.000		1 Laporan	3.950.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	172.825.440		1 Laporan	185.782.355
Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	164.069.000		1 Laporan	148.466.400
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	165.461.408		1 Laporan	157.212.128
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)		3 Jenis	531.778.398		3 Jenis	583.858.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	Samarinda	1 Unit	12.203.000		1 Unit	35.510.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1 Unit	499.065.398		1 Unit	509.328.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Samarinda	10 Unit	20.510.000		10 Unit	39.020.000
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)		774.940.000	1.032.221.000	APBD	774.940.000	1.252.428.400
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)		156 Ha	1.032.221.000		156 Ha	1.252.428.400
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	Batikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kutub, Mahulu dan Kutim	156 Ha	1.032.221.000		156 Ha	1.252.428.400
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				3.999.996.448			3.999.996.448
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan		92%	1.095.255.448	APBD	92%	1.095.255.448
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)		12 Bulan	82.560.000		12 Bulan	82.560.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1 Dokumen	82.560.000		1 Dokumen	82.560.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20%	80.010.000		20%	80.010.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarakan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	Batikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	7 Orang	80.010.000		7 Orang	80.010.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)		3 Unit	281.015.000		3 Unit	281.015.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	2.918.000		4 Paket	2.918.000
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	2 Paket	2.200.000		2 Paket	2.200.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	Samarinda	4 Paket	65.224.000		4 Paket	65.224.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Samarinda	2 Paket	14.953.000		2 Paket	14.953.000
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	Samarinda	12 Dokumen	1.920.000		12 Dokumen	1.920.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Batikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Laporan	193.800.000		1 Laporan	193.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		2 Jenis	95.090.000		2 Jenis	95.090.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	4 Unit	95.090.000		4 Unit	95.090.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)		3 Jenis	518.997.448		3 Jenis	518.997.448
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	3.000.000		1 Laporan	3.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	79.549.320		1 Laporan	79.549.320
Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	136.958.000		1 Laporan	136.958.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1 Laporan	299.490.128		1 Laporan	299.490.128
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (Jenis)		3 Jenis	37.583.000		3 Jenis	37.583.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	2 Unit	12.203.000		2 Unit	12.203.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1 Unit	-		1 Unit	-

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Samarinda	13 Unit	25.380.000		13 Unit	25.380.000
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)		85%	2.904.741.000	APBD	85%	2.904.741.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)		50.000 Benih	2.904.741.000		50.000 Benih	2.904.741.000
Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan (Laporan)	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	1 Laporan	2.904.741.000		1 Laporan	2.904.741.000
				53.197.790.000			54.203.951.443

Samarinda,

2022

KEPALA,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690120 199403 1 014

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2023, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2023. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2023.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	RKPD 2023 (Rp)
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	53.197.790.000,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	43.618.793.138,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.01	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2,779,000,968,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.02	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	2,799,999,446,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.03	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	3,999,996,448,-

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPa pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS PERKEBUNAN										
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	23.611.237.650	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	24.072.561.738
3.27.01.1.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	1.774.925.300	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	74	1.275.323.500
3.27.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	802.771.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	648.757.500
3.27.01.1.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	972.154.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	626.566.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	15.359.114.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	15.280.723.258
3.27.01.1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	79 Orang/ Bulan	14.906.274.750	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	79 Orang/ Bulan	14.906.203.258
3.27.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	452.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	374.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	936.032.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	392.570.000
3.27.01.1.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1 Paket	352.032.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1 Paket	282.500.000
3.27.01.1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50 Orang	584.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50 Orang	110.070.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	5 Unit	1.716.947.254	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	5 Unit	1.738.342.000
3.27.01.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	35.991.708	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	35.902.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah pkaet peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	167.310.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah pkaet peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	117.262.000
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	352.514.181	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	439.938.000
3.27.01.1.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	69.731.365	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	52.640.000
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	9.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	9.600.000
3.27.01.1.06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	1.081.800.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Proutinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	1.083.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	227.407.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	1.388.704.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2 Unit	985.220.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	25 Unit	227.407.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	25 Unit	403.484.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	2.634.801.146	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	2.926.567.488
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	31.210.000
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	494.401.410	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	479.967.400
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	1 Laporan	304.192.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	1 Laporan	336.242.400
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1.806.207.736	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	2.079.147.688
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	962.009.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	1.070.331.492
3.27.01.1.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas Dibayarkan Pajak dan operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18 Unit	400.217.700	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18 Unit	271.654.400

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
3.27.01.1.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2 Unit	349.932.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2 Unit	396.708.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlahsarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	21 Unit	211.860.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlahsarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	21 Unit	401.969.092
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	6.965.557.600	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	6.766.710.000
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504	
			Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000				Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000				Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000	
			Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517				Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517	
			Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25				Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/ Ha)	20,03 Ton/ Ha	6.965.557.600	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/ Ha)	20,03 Ton/ Ha	6.766.710.000
3.27.02.1.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1 Laporan	6.965.557.600	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1 Laporan	6.766.710.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30 KT	7.222.948.500	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30 KT	7.428.634.000
			Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674				Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	545 Ha	7.222.948.500	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	545 Ha	7.428.634.000
3.27.03.1.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	7.222.948.500	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	7.428.634.000
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton CO2eq	1.120.000.000	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton CO2eq	1.827.790.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	137	1.120.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	137	1.827.790.000
			a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	132				a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	132	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5				b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	
3.27.05.1.01	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9317 Ha	585.660.000	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9317 Ha	1.027.790.000
3.27.05.1.01	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	150 Ha	534.340.000	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	150 Ha	800.000.000
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35 Perusahaan	750.000.000	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35 Perusahaan	1.050.000.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dinitirakan (perusahaan)	107 Perusahaan	750.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dinitirakan (perusahaan)	107 Perusahaan	1.050.000.000
3.27.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diaawasi (laporan)	1 Laporan	750.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diaawasi (laporan)	1 Laporan	1.050.000.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	4.234.806.900	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	2.473.097.400
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	312.046.900	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	187.295.700
3.27.07.1.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Samarinda dan Baikpapan	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (Orang)	15 Orang	312.046.900	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Samarinda dan Baikpapan	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (Orang)	15 Orang	187.295.700
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.877.575.000	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.057.437.900
			Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit				Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	7 Unit				Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	7 Unit	
3.27.07.1.02	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	1 Dokumen	1.343.750.000	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	1 Dokumen	656.480.000
3.27.07.1.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok	533.825.000	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok	400.957.900
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	2.045.185.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	1.228.363.800
			Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT				Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	
3.27.07.1.03	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	552.475.000	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	210.455.900
3.27.07.1.03	Pendampingan manajemen korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pendampingan manajemen korporasi petani (Laporan)	1 Laporan	993.750.000	Pendampingan manajemen korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pendampingan manajemen korporasi petani (Laporan)	1 Laporan	693.228.000
3.27.07.1.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemen (Unit)	1 Unit	262.500.000	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemen (Unit)	1 Unit	157.293.000
3.27.07.1.03	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	236.460.000	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	167.386.900
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.496.308.950					2.779.000.968
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.460.138.650	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.773.599.068
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	93.120.000
3.27.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	93.120.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
Kode	RANCANGAN AWAL RKPD								
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	158.990.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	158.990.000
3.27.01.1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	13 Orang	158.990.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	158.990.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	294.022.117	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	586.467.800
3.27.01.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	4.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	14.792.800
3.27.01.1.06	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	24.980.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	48.431.000
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	61.701.617	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	58.574.000
3.27.01.1.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4 Paket	7.000.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	5.430.000
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	12 Dokumen	3.840.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	3.840.000
3.27.01.1.06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kutar, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	192.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kutar, Paser, Samarinda, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	455.400.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6 Jenis	334.506.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	170.752.500
3.27.01.1.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	15 Unit	334.506.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	170.752.500
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	435.339.733	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	533.642.768
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.400.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	5.500.000
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	86.977.605	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	122.738.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	188.750.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	239.943.360
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	165.461.408
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	144.760.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	230.626.000
3.27.01.1.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	2 Unit	35.910.600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	2 Unit	22.406.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4 Unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4 Unit	180.000.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13 Unit	18.850.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13 Unit	28.220.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000 Benih	1.036.170.300	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000 Benih	1.005.401.900
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)	6.000.000 Benih	1.036.170.300	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)	6.000.000 Benih	1.005.401.900
3.27.02.1.02	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Benih)	150 Sertifikat	461.297.250	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Benih)	150 Sertifikat	508.790.900
3.27.02.1.02	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bbit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan	574.873.050	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bbit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bbit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan	496.611.000
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN	TANAMAN PERKEBUNAN				3.197.333.000					2.799.999.446
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.944.904.600	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.767.778.446

RANCANGAN AWAL RRPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	93.120.000
3.27.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	93.120.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	95.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	90.000.000
3.27.01.1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsinya	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	6 Orang	95.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	6 Orang	90.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	309.980.917	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	358.353.200
3.27.01.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	10.699.946	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	9.139.000
3.27.01.1.06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	17.600.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	3.420.000
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4 Paket	77.777.300	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4 Paket	69.604.000
3.27.01.1.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	24.783.671	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	20.230.200
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	5.120.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	5.760.000
3.27.01.1.06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	174.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	250.200.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5 Jenis	367.934.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5 Jenis	186.971.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	17 Unit	367.934.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	17 Unit	186.971.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	495.410.883	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	507.555.848

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	3.950.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	5.200.000
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	185.782.355	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	172.825.440
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	148.466.400	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	164.069.000
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	165.461.408
3.27.01.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	583.858.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	531.778.398
3.27.01.1.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya yang dipelihara dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	1 Unit	35.510.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya yang dipelihara dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	1 Unit	12.203.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	509.328.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	499.065.398
3.27.01.1.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10 Unit	39.020.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10 Unit	20.510.000
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	774.940.000	1.252.428.400	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	774.940.000	1.032.221.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.252.428.400	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.032.221.000
3.27.05.1.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.252.428.400	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Baikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provtinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.032.221.000
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					2.401.807.400					3.999.996.448
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	983.464.992	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.095.255.448

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	82.560.000
3.27.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	82.560.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	95.360.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	80.010.000
3.27.01.1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	7 Orang	95.360.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	7 Orang	80.010.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	268.815.973	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	281.015.000
3.27.01.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	2.703.273	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	2.918.000
3.27.01.1.06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	2.475.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	2.200.000
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	61.165.200	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	65.224.000
3.27.01.1.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2 Paket	5.552.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2 Paket	14.953.000
3.27.01.1.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan penundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan penundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	12 Dokumen	1.920.000
3.27.01.1.06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	195.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	193.800.000
			Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2 Jenis		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2 Jenis	95.090.000
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit)	4 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit)	4 Unit	95.090.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
Kode	RANCANGAN AWAL RKPD								
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/ pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	407.984.019	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/ pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	518.997.448
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	3.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	92.987.659	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	79.549.320
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	129.231.200	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	136.958.000
3.27.01.1.08	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	182.765.160	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	299.490.128
3.27.01.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	118.785.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	37.583.000
3.27.01.1.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	36.510.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12.203.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	44.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	-
3.27.01.1.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13 Unit	38.275.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	25.380.000

RANCANGAN AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85%	1.418.342.408	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85%	2.904.741.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)	50.000 Benih	1.418.342.408	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)	50.000 Benih	2.904.741.000
3.27.02.1.02	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kutim	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan	1 Laporan	1.418.342.408	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kutim	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan	1 Laporan	2.904.741.000
TOTAL					52.000.000.000					53.197.790.000

Samarinda,

KEPALA,

2022

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690120 199403 1 014

BAB V. PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023 dan Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2023 dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023. Renja 2023 disusun sebagai rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023: “***Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat***” (*The realization of sustainable plantation development for community welfare*).

Samarinda, Juli 2022

Kepala Dinas,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN..	
I.1. Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu PD dan Capaian Renstra PD	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	70
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	73
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kaltim.....	87
II.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	90
II.6. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	90
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	107
III.2.Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	113
III.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	115
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
IV.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.....	131
IV.2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan.....	132
V. PENUTUP.....	144
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
II.1 Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17
II.2 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Karet Seluas 100 Ha Intensifikasi Karet Seluas 100 Ha.....	19
II.3 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Seluas 20 Ha	21
II.4 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi kelapa sawit 100 Ha	21
II.5 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi lada 150 Ha, dan rehabilitasi lada seluas 50 Ha.....	22
II.6 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan kakao seluas 50 Ha, dan Intensifikasi kakao seluas 150 Ha.....	24
II.7 Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	27
II.8 Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Illegal.....	29
II.9 Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	31
II.10 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan.....	32
II.11 Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2021.....	33
II.12 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 100 Ha.....	34
II.13 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha.....	34
II.14 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha.....	35
II.15 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha.....	36
II.16 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha.....	36

II.17	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha.....	37
II.18	Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK.....	39
II.19	Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2021....	43
II.20	KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2021.....	45
II.21	Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	47
II.22	Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	49
II.23	Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	50
II.24	Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur.....	53
II.25	Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2021.....	54
II.26	Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2021.....	58
II.27	Perusahan yang Dibina Tahun 2021.....	59
II.28	Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021.....	62
II.29	Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021.....	63
II.30	Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2021.....	64
II.31	Promosi yang Diikuti Tahun 2021.....	66
II.32	Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani Tahun 2021...	67
II.33	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	70
II.34	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2013- 2021).....	71
II.35	Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2020 Oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan.....	75
II.36	Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2014-2021.....	77
T.C.29	Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2021.....	91

T.C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	119
IV.1 Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	131
T.C 31 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur.....	133

DAFTAR GAMBAR


<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
II.1 Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2021.....	28
II.2 Areal dengan Nilai Konservasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	44
II.3 Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2021.....	72
II.4 ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2021.....	72
II.5 NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2021.....	73
III.1 Kerangka Strategi Pembangunan Perkebunan Nasional.....	112

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009